

**TINGKAT PEMAHAMAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN  
TERHADAP KODE ETIK PUSTAKAWAN DI DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN PIDIE**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**Muhammad Rozie**

**NIM: 190503089**

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora  
Prodi Ilmu Perpustakaan



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM- BANDA ACEH  
TAHUN 2025 M/ 1447 H**

**TINGKAT PEMAHAMAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN TERHADAP KODE  
ETIK PUSTAKAWAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PIDIE**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perpustakaan

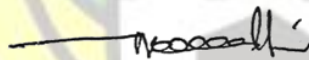
Oleh :

**MUHAMMAD ROZIE**  
**NIM : 190503089**

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Perpustakaan

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing Tunggal



**Nazaruddin, S.Ag., S.S., M.L.I.S., Ph.D.**  
**NIP : 197101101999031002**

Disetujui Oleh  
Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan



**Mukhtaruddin, S.Ag., M.L.I.S.**  
**NIP : 197711152009121001**

**SKRIPSI**

**TINGKAT PEMAHAMAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN TERHADAP  
KODE ETIK PERPUSTAKAAN TERHADAP KODE ETIK PUSTAKAWAN  
DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PIDIE**

Telah Diuji Oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan **Dinyatakan Lulus** Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Oktober 2025 M  
21 Rabiul Akhir 1447 H  
Di Darussalam-Banda Aceh

**DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**



Nazaruddin, S.Ag., S.S., M.L.I.S., Ph.D.  
NIP. 197101101999031002

Siti Aminah, S.IP., M.MLS.  
NIP. 198901022025212012

**Penguji I,**

**Penguji II,**



Umar Bin Abd. Aziz, M.A.  
NIP. 197011071999031002

Asnawi, M.IP.  
NIP. 198811222020121010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Syarifuddin, M.Ag., Ph.D  
NIP. 197801011997031005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhammad Rozie  
NIM : 190503089  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Prodi : Ilmu Perpustakaan  
Judul Skripsi : Tingkat Pemahaman Pengelolaan Perpustakaan Terhadap Kode Etik Pustakawan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Pidie

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya untuk pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 2 September 2025



**Muhammad Rozie**  
NIM. 190503089

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah rabbil 'alamin.* Segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “***Tingkat Pemahaman Pengelolaan Perpustakaan Terhadap Kode Etik Pustakawan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Pidie***”. Shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan pencerahan bagi umatnya, sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dan islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ucapkan sangat berterima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda alm Ibrahim yusuf, dan ibunda Naimah orang yang paling berjasa yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan do'a, dukungan dan nasehat. Dan kepada kakak Alfita Marzalena, Alvianti Ramazani, Miftahul Jannah dan adik Ahlul Husna tercinta yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Rektor dan Wakil Rektor serta segenap Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Mukhtaruddin, M.LIS selaku ketua Prodi Ilmu Perpustakaan, dan Bapak T Mulkan safri, M.IP selaku sekretaris, dan serta jajaran Staf Prodi Ilmu Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S., Ph.D. selaku pembimbing pertama yang telah bersabar dalam membimbing, meluangkan waktunya, dan merelakan tenaga dan pikiran serta turut memberi perhatian dalam memberikan pendampingan selama proses penelitian skripsi ini;
6. Bapak Drs. Saifuddin A. Rasyid, M.LIS selaku Penasehat Akademik;

7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Adab dan Humaniora yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya. Dan penulis dapat menyelesaikan urusan perkuliahan ini dengan baik;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie dan Pustakawan, yang telah bersedia meluangkan waktu memberi informasi dan data yang akurat
9. Teman teman seperjuangan angkatan 2019 Ilmu Perpustakaan yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dalam menyelesaikan skripsi dan studi S1 Ilmu Perpustakaan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penelitiannya. Kebenaran selalu datang dari Allah SWT dan kesalahan itu datang dari penelitisendiri, oleh karena itu peneliti dengan segala kerendahan hati kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Aaminn ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 2 September 2025  
Penulis,

**Muhammad Rozie**  
NIM. 190503089

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Penjelasan Istilah .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka .....	9
B. Pemahaman Pengelolaan Perpustakaan .....	12
1. Pengertian Pemahaman Pengelolaan Perpustakaan.....	12
2. Tujuan Pengelolaan Perpustakaan .....	16
3. Manfaat Pengelolaan Perpustakaan .....	18
4. Indikator Pengelolaan Perpustakaan.....	20
C. Kode Etik Pustakawan .....	24
1. Pengertian Kode Etik Pustakawan.....	24
2. Tujuan Kode Etik Pustakawan.....	28
3. Fungsi Kode Etik Pustakawan.....	29
4. Indikator Kode Etik Pustakawan .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Rancangan Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Populasi.....	38
D. Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>58</b>
A.	Kesimpulan .....	58
B.	Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

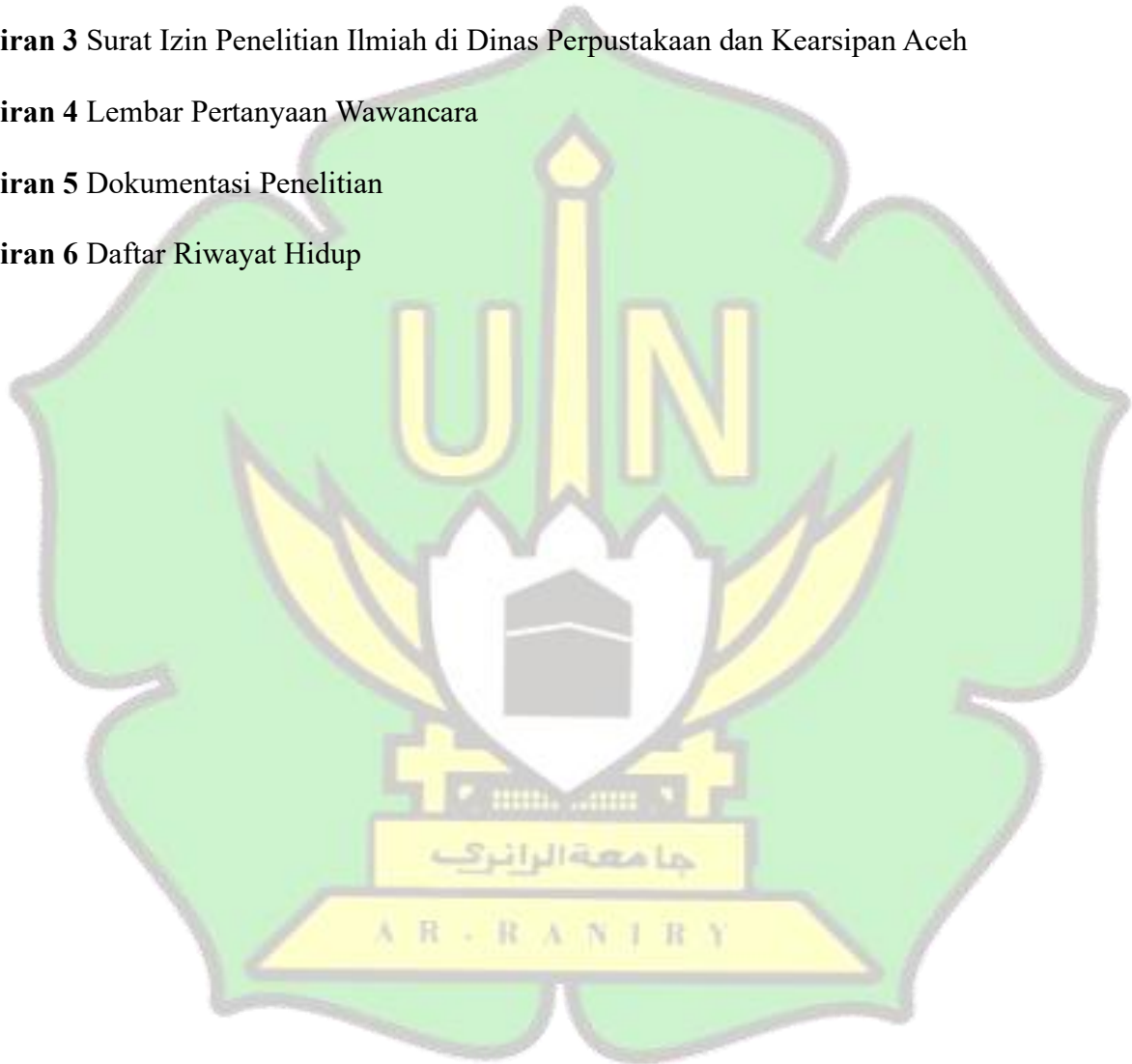
**Lampiran 2** Surat Izin Penelitian Skripsi

**Lampiran 3** Surat Izin Penelitian Ilmiah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

**Lampiran 4** Lembar Pertanyaan Wawancara

**Lampiran 5** Dokumentasi Penelitian

**Lampiran 6** Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Tingkat Pemahaman Pengelolaan Perpustakaan Terhadap Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie”. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara standar etika pustakawan yang diharapkan dengan praktik layanan di lapangan, seperti kurangnya sikap ramah, lemahnya perlindungan data pemustaka, dan terbatasnya pengetahuan pustakawan terhadap kode etik profesi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pustakawan terhadap kode etik tergolong cukup baik dalam aspek tanggung jawab, keadilan, dan integritas pelayanan. Namun, masih terdapat kendala seperti minimnya pelatihan, latar belakang pendidikan yang beragam, dan lemahnya pengawasan internal. Faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut meliputi pengalaman kerja, budaya organisasi, dukungan pimpinan, dan keterbatasan pengembangan kompetensi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan kode etik secara berkala, peningkatan peran pimpinan sebagai teladan, serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung penerapan nilai-nilai etika pustakawan.

**Kata Kunci: Kode Etik Pustakawan, Pemahaman, Pengelolaan Perpustakaan, Etika Profesi, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Pidie.**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan memiliki peran penting dalam menyediakan informasi dan mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Demi menjalankan fungsinya, pustakawan sebagai Pengelola perpustakaan dituntut untuk bertindak profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Kode Etik Pustakawan menjadi pedoman penting yang mencakup prinsip-prinsip seperti menjaga kerahasiaan informasi pengguna, memberikan layanan tanpa diskriminasi, dan berkomitmen pada pengembangan profesional berkelanjutan, yang kesemuanya bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan sebagai institusi yang dapat diandalkan, pustakawan tidak hanya berperan sebagai penghubung pengguna dengan informasi yang mereka butuhkan, tetapi juga sebagai pendidik informasi yang membantu masyarakat mengembangkan keterampilan literasi informasi yang krusial di era digital.<sup>1</sup>

Kode Etik Pustakawan Indonesia yang disusun oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) mencakup prinsip-prinsip moral dan profesional yang harus ditaati oleh pustakawan. Namun dalam praktiknya, tidak semua pustakawan memahami dan mengimplementasikan kode etik ini secara optimal. Rendahnya pemahaman

---

<sup>1</sup>Purwanti, D. 2019. "Persepsi Pustakawan terhadap Kode Etik Profesi Pustakawan Indonesia." *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 8 (2): 110-118. <https://doi.org/10.22146/jipi.45502>.

dapat menyebabkan pelanggaran etika, seperti diskriminasi layanan, penyalahgunaan informasi, dan ketidakprofesionalan dalam pekerjaan.<sup>2</sup>

Terdapat kesenjangan dalam pemahaman pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan secara menyeluruh, seperti beberapa pustakawan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip kode etik apakah sikap keadilan, tanggung jawab, dan menjaga kerahasiaan informasi pengguna. Ketidaksesuaian ini menjadi isu penting karena dapat berdampak langsung terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Kurangnya jumlah pustakawan mengikuti pelatihan kode etik secara berkala, sehingga pemahaman terhadap nilai-nilai dasar profesi pustakawan masih terbatas. Dampaknya terlihat dalam praktik layanan, seperti kurangnya sikap ramah, keterlambatan dalam pemrosesan informasi, hingga lemahnya perlindungan terhadap data pemustaka, sebagai lembaga publik yang berperan penting dalam penyediaan informasi dan pendidikan masyarakat, perpustakaan daerah memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi.<sup>4</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, terlihat adanya perilaku pustakawan yang menunjukkan indikasi kurang memahami prinsip-prinsip dasar Kode Etik Pustakawan. Hal ini tampak dari cara mereka berinteraksi dengan pemustaka, seperti menunjuk-nunjuk arah tanpa memberikan penjelasan yang sopan atau informatif. Misalnya, saat pemustaka datang menanyakan lokasi koleksi buku tertentu, pustakawan hanya memberikan isyarat tangan tanpa menyapa atau bertanya lebih lanjut mengenai kebutuhan pengguna. Sikap ini menimbulkan kesan bahwa

---

<sup>2</sup>Siregar, D., and N. Maulina. 2020. "Implementasi Kode Etik Pustakawan dalam Pelayanan di Perpustakaan Umum." *Jurnal Pustakawan Indonesia* 10 (1): 22-30.

<sup>3</sup>Ginting, Rafika Zahara, Khoirul Jamil, and Yusniah Yusniah. "Penerapan Etika Pustakawan Dalam Pembentukan Karakter Budaya Kerja Pustakawan Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Sumatera Utara." *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 140-147.

<sup>4</sup>Sopian, I., Umar, A., & Arifudin, Y. F. (2023). Pengembangan Kode Etik Pustakawan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pemustaka. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(8), 3728-3736.

pustakawan tidak memahami pentingnya etika dalam pelayanan informasi, seperti bersikap ramah, komunikatif, dan menjaga kenyamanan pemustaka. Fenomena ini menjadi indikasi awal yang mendorong peneliti untuk menyelidiki lebih lanjut sejauh mana pemahaman pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan, serta apakah mereka pernah mendapatkan pelatihan terkait hal tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pustakawan Ibu Yurni adanya beberapa pustakawan belum sepenuhnya mengetahui tentang kode etik pustakawan dan selama ini pustakawan masih fokus hanya pada sistem katalog dan Pengelolaan koleksi. Pemahaman tentang tanggung jawab profesional masih terbatas pada hal-hal dasar seperti melayani pemustaka.<sup>5</sup>

Dalam realitasnya, sebagian pustakawan belum sepenuhnya mengetahui tentang kode etik pustakawan. Akibatnya, muncul berbagai persoalan dalam layanan, seperti sikap yang kurang ramah dan lambatnya pemrosesan informasi. Padahal, sebagai lembaga publik yang seharusnya menjadi contoh dalam hal profesionalisme dan pelayanan informasi, perpustakaan daerah memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar. Kesenjangan inilah yang menjadi alasan utama perlunya penelitian ini, agar dapat ditemukan akar permasalahan dan solusi nyata untuk meningkatkan pemahaman serta penerapan kode etik pustakawan secara menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman Pengelolaan perpustakaan terhadap kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie dan untuk memberikan masukan yang dapat meningkatkan profesionalitas kerja. Berdasarkan fenomena dan permasalahan diatas, peneliti

---

<sup>5</sup> Wawancara bersama pustakawan Ibu Yurni pada hari Kamis, 28 mei 2025 pukul 10.30

mengangkat judul "Tingkat Pemahaman Pengelolaan Perpustakaan terhadap Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana tingkat pemahaman Pengelolaan perpustakaan terhadap kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan masalah dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman Pengelolaan perpustakaan terhadap kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pembacanya. Melalui penelitian ini terdapat berbagai manfaat, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpustakaan dan informasi, khususnya terkait pemahaman kode etik pustakawan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi pengalaman berharga dalam menerapkan metode penelitian ilmiah secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga analisis dan interpretasi hasil. Melalui proses ini, peneliti tidak hanya mengasah keterampilan akademik, tetapi juga memperluas wawasan mengenai kompleksitas etika profesi pustakawan dalam konteks kelembagaan.

Peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai seperti tanggung jawab, integritas, dan keadilan diinternalisasi dan diimplementasikan dalam praktik kerja pustakawan. Selain itu, penelitian ini memperkuat kesadaran peneliti akan pentingnya pendekatan reflektif dan humanis dalam studi kepastakawanan, serta membuka peluang untuk kontribusi nyata dalam pengembangan profesi dan kebijakan literasi di tingkat lokal.

b. Bagi Pustakawan

Bagi pustakawan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman praktis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya secara lebih etis dan profesional. Temuan-temuan yang dihasilkan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana kode etik dapat diterapkan dalam situasi kerja sehari-hari, termasuk dalam menghadapi dilema layanan, menjaga komunikasi yang sopan dan terbuka, serta membangun kerja sama tim yang sehat.

Penelitian ini juga mendorong pustakawan untuk melakukan refleksi terhadap sikap dan perilaku kerja mereka, serta memperkuat komitmen terhadap pelayanan informasi yang adil, inklusif, dan bermartabat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan penguatan identitas profesi pustakawan sebagai penjaga nilai-nilai pengetahuan dan etika.

c. Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie

Bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie, hasil penelitian ini memiliki nilai strategis sebagai bahan evaluasi kelembagaan. Temuan mengenai tingkat pemahaman pustakawan terhadap kode etik dapat digunakan untuk menilai efektivitas pembinaan profesi yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan penguatan.

Penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam merancang program pelatihan, workshop, atau kegiatan peningkatan kompetensi yang berfokus pada etika profesi dan pengembangan karakter kerja pustakawan. Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat mendukung perumusan kebijakan internal yang lebih responsif terhadap kebutuhan pustakawan dan pemustaka, serta memperkuat posisi perpustakaan sebagai institusi publik yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan berkualitas.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Pemahaman

Pemahaman dalam konteks pustakawan merujuk pada sejauh mana individu mengerti dan mampu menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kode Etik Pustakawan. Pemahaman yang baik mencakup kesadaran akan nilai-nilai profesional seperti keadilan, tanggung jawab, dan kerahasiaan informasi pengguna. Pemahaman yang mendalam terhadap kode etik sangat penting untuk memastikan bahwa pustakawan dapat memberikan layanan yang sesuai dengan standar profesional dan memenuhi harapan pemustaka.<sup>6</sup>

Artinya pustakawan harus benar-benar mengerti dan bisa menerapkan aturan-aturan kode etik mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Tidak hanya sekedar tahu aturannya saja, tetapi harus paham bagaimana cara bersikap adil kepada semua pengguna perpustakaan, bertanggung jawab terhadap tugas, dan menjaga kerahasiaan data pengunjung. Pemahaman yang mendalam ini penting karena dengan begitu pustakawan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai standar profesi, sehingga pengguna perpustakaan merasa puas dan percaya dengan layanan yang diberikan.

---

<sup>6</sup>Andena, Yosefa, Albertus Pramoekti Narendra, and Anton Hermawan. "Etika Pustakawan dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Tunas Muda SMP Stella Matutina Salatiga." *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (2023): 280.

## 2. Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas operasional dan manajemen perpustakaan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan layanan perpustakaan. Peran Pengelolaan sangat krusial dalam menentukan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna. Pengelolaan layanan sirkulasi perpustakaan yang efektif dapat meningkatkan minat kunjung peserta didik dan memastikan bahwa kebutuhan informasi pengguna terpenuhi dengan baik.<sup>7</sup>

Pengelolaan Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie merujuk pada sejauh mana para Pengelolaan memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan dalam mengelola kegiatan perpustakaan secara efektif dan profesional sesuai dengan kebijakan institusi serta standar kepustakawanan. Hal ini mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip manajemen perpustakaan, layanan informasi kepada pemustaka, serta penerapan kode etik pustakawan dalam menjalankan tugas. Seorang Pengelolaan yang memiliki pemahaman yang baik di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie akan mampu merancang dan melaksanakan program layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menjaga integritas dalam Pengelolaan informasi, serta berkontribusi dalam peningkatan budaya literasi dan pelayanan publik di daerah tersebut.

## 3. Kode Etik Pustakawan

Kode Etik Pustakawan adalah seperangkat prinsip moral dan pedoman perilaku profesional yang ditetapkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) untuk mengarahkan tindakan dan sikap pustakawan dalam menjalankan tugas dan

---

<sup>7</sup>Anshari, Muhammad, dan Laila Silviana. "Pengelolaan Layanan Sirkulasi dalam Meningkatkan Minat Kunjung Peserta Didik di Perpustakaan Sekolah." *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam* 6, no. 1, 2021, hal. 8.

tanggung jawabnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjamin bahwa pustakawan bekerja dengan integritas, keadilan, tanggung jawab, dan menghormati hak pemustaka dalam mengakses informasi. Kode etik juga mencakup kewajiban pustakawan terhadap profesinya sendiri, terhadap pengguna layanan, terhadap kolega, dan terhadap masyarakat. Dengan menjunjung tinggi kode etik, pustakawan diharapkan dapat menjaga martabat profesi dan memberikan layanan informasi secara objektif, jujur, dan bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian diatas Kode Etik Pustakawan adalah kumpulan aturan moral dan panduan perilaku professional. Dan untuk mengatur bagaimana pustakawan harus bersikap dan bertindak dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan Tujuan dari kode etik ini adalah memastikan pustakawan bekerja dengan jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghormati hak setiap orang untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

---

<sup>8</sup>Andena, Yosefa, Albertus Pramoekti Narendra, and Anton Hermawan. "Etika Pustakawan Dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka Di Perpustakaan Tunas Muda SMP Stella Matutina Salatiga." *Journal Papyrus: Sosial, Humaniora, Perpustakaan dan Informasi* 2, no. 2 (2023): 1-8.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka melihat tingkat pemahaman Pengelolaan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie terhadap kode etik pustakawan, dengan fokus pada indikator pemahaman dan penerapan kode etik baik secara personal maupun tim, penelitian ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang kesadaran profesional pustakawan, yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan profesionalisme pustakawan di masa mendatang. Berikut beberapa kajian Pustaka:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sopian, Umar, dan Arifudin berjudul *“Pengembangan Kode Etik Pustakawan dalam Memberikan Pelayanan kepada Pemustaka”* menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pustakawan, khususnya dalam aspek komunikasi, integritas, dan profesionalisme. Penelitian ini menekankan pentingnya kode etik sebagai landasan moral dalam interaksi pustakawan dengan pemustaka.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap pentingnya nilai-nilai etika dalam praktik kepastakawanan. Keduanya sama-sama menyoroiti bahwa kualitas layanan perpustakaan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pustakawan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika profesi. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang serupa, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, untuk menggali fenomena etika dalam konteks kerja pustakawan. Namun, terdapat

perbedaan dalam fokus kajian. Penelitian Sopian dkk. menitikberatkan pada pengembangan kode etik sebagai instrumen peningkatan layanan, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti tingkat pemahaman Pengelolaan perpustakaan terhadap kode etik pustakawan, baik secara individu maupun tim, dalam konteks kerja kelembagaan di lingkungan perpustakaan daerah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah kajian yang belum dijangkau oleh penelitian sebelumnya, yaitu pemetaan pemahaman pustakawan terhadap prinsip-prinsip etika profesi secara sistematis dan reflektif.<sup>9</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ginting, Jamil, dan Yusniah berjudul “*Penerapan Etika Pustakawan dalam Pembentukan Karakter Budaya Kerja di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara*” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika pustakawan berkontribusi positif terhadap pembentukan budaya kerja, terutama dalam aspek hubungan antar rekan kerja, pelayanan kepada pengguna, dan komunikasi dengan atasan. Etika profesi dipandang sebagai fondasi dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.<sup>10</sup>

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap pentingnya nilai-nilai etika pustakawan dalam praktik kerja sehari-hari. Keduanya menyoroti bahwa etika profesi memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan dan dinamika kerja di lingkungan perpustakaan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan

---

<sup>9</sup> Sopian, Imam, Abubakar Umar, and Yadi Fahmi Arifudin. "Pengembangan Kode Etik Pustakawan dalam Memberikan Pelayanan kepada Pemustaka." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 8 (2023): 3728–3736.

<sup>10</sup> Ginting, Rafika Zahara, Khoirul Jamil, and Yusniah. "Penerapan Etika Pustakawan dalam Pembentukan Karakter Budaya Kerja Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara." *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 140–147.

data yang serupa untuk menggali fenomena etika dalam konteks kelembagaan. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian. Penelitian Ginting dkk. lebih menitikberatkan pada dampak penerapan etika terhadap pembentukan budaya kerja institusional, tanpa mengkaji secara spesifik pemahaman pustakawan terhadap isi kode etik sebagai prinsip moral profesi. Sementara itu, penelitian ini secara eksplisit meneliti tingkat pemahaman pustakawan terhadap kode etik, baik secara personal maupun kolektif, sebagai dasar dalam menjalankan tugas layanan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan berupa pemetaan kesadaran dan internalisasi nilai-nilai etika pustakawan yang belum dijangkau oleh penelitian sebelumnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Juwitasari berjudul "*Pelaksanaan Kode Etik Pustakawan untuk Memaksimalkan Kualitas Layanan Perpustakaan SMP Negeri 1 Sumberrejo*" menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pustakawan terhadap prinsip-prinsip etika masih rendah dan penerapan kode etik belum maksimal. Penelitian ini mengungkap lemahnya sikap pustakawan dalam menegakkan aturan serta minimnya pelatihan terkait kode etik, yang berdampak pada kualitas layanan informasi di lingkungan sekolah.<sup>11</sup>

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap pemahaman dan pelaksanaan kode etik pustakawan sebagai variabel utama. Keduanya sama-sama menyoroti bahwa rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai etika profesi dapat memengaruhi kualitas layanan dan profesionalitas pustakawan. Selain itu, kedua

---

<sup>11</sup>.Ariani, Dede Meiliya, and Prisca Juwitasari. "Pelaksanaan Kode Etik Pustakawan untuk Memaksimalkan Kualitas Layanan Perpustakaan SMP Negeri 1 Sumberrejo." *Tibannbaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 7, no. 1 (2023): 24–27.

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang serupa untuk menggali fenomena etika dalam praktik kerja pustakawan.

Namun, terdapat perbedaan dalam lingkup dan kedalaman analisis. Penelitian Ariani dan Juvasari terbatas pada satu perpustakaan sekolah, sehingga generalisasi hasil menjadi sempit dan tidak mencakup faktor-faktor penyebab lemahnya pemahaman seperti latar belakang pendidikan atau profesionalitas pustakawan. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di lingkungan perpustakaan daerah dengan cakupan yang lebih luas, serta menyoroti peran Pengelolaan perpustakaan dalam memahami dan menjalankan kode etik secara menyeluruh, baik secara personal maupun kolektif. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman pustakawan, seperti pengalaman kerja, budaya organisasi, dan dukungan kelembagaan, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan etika profesi pustakawan.

## B. Pemahaman Pengelolaan Perpustakaan

### 1. Pengertian Pemahaman Pengelolaan Perpustakaan

Secara etimologis, kata “pemahaman” berasal dari kata dasar “paham” yang berarti mengetahui secara mendalam, tidak hanya secara permukaan atau sekadar mengenal. Dalam konteks kepustakawanan, pemahaman Pengelolaan perpustakaan merujuk pada tingkat pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu atau tim dalam mengelola seluruh aspek operasional dan strategis perpustakaan secara profesional. Pemahaman ini mencakup kemampuan untuk menginterpretasikan visi dan misi lembaga, merumuskan kebijakan layanan yang relevan, serta mengelola sumber daya informasi dan manusia secara efektif dan beretika.

Pengelolaan perpustakaan bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan aktor strategis yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi layanan serta sumber daya perpustakaan. Mereka harus mampu membaca kebutuhan pemustaka, merancang program literasi yang inklusif, dan memastikan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai ruang pembelajaran yang dinamis dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pemahaman yang baik dari Pengelolaan menjadi penentu utama kualitas layanan, efektivitas program, dan pencapaian tujuan kelembagaan.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori Spencer & Spencer, seorang Pengelolaan perpustakaan yang efektif harus memiliki pemahaman mendalam terhadap visi dan misi perpustakaan sebagai lembaga informasi, kemampuan teknis dalam menyusun kebijakan layanan yang berorientasi pada pengguna, keahlian dalam manajemen dan pengembangan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pemahaman ini menjadi landasan bagi Pengelolaan perpustakaan dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator akses pengetahuan, Pengelolaan sumber daya informasi, dan pemimpin yang mampu mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat yang relevan dengan tuntutan era digital.<sup>13</sup> Pemahaman Pengelolaan perpustakaan mengacu pada tingkat pengertian, kesadaran, dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang bertugas mengelola atau mengatur jalannya kegiatan perpustakaan, baik dari segi teknis, administrasi, maupun layanan kepada pemustaka. Pemahaman ini mencakup sejauh mana individu tersebut mengetahui dan mampu menjelaskan konsep, prinsip, serta

---

<sup>12</sup>Sopian, Imam, Abubakar Umar, and Yadi Fahmi Arifudin. "Pengembangan Kode Etik Pustakawan dalam Memberikan Pelayanan kepada Pemustaka." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 8 (2023): 3728.

<sup>13</sup>Ariani, Dede Meiliya, and Prisca Juvitasari. "Pelaksanaan Kode Etik Pustakawan untuk Memaksimalkan Kualitas Layanan Perpustakaan SMP Negeri 1 Sumberrejo." *Tibanndaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 7, no. 1 (2023): 24.

aturan-aturan yang berlaku dalam praktik kepastakawanan. Seorang Pengelolaan perpustakaan yang memiliki pemahaman yang baik akan mampu menerapkan kebijakan, memberikan pelayanan prima, serta menjalankan tugas sesuai dengan norma dan standar profesi yang berlaku, termasuk dalam hal etika dan tanggung jawab moral.<sup>14</sup>

Dalam konteks kepastakawanan di Indonesia, pemahaman Pengelolaan perpustakaan tidak hanya mencakup pengetahuan teknis dan administratif, tetapi juga kesadaran terhadap nilai-nilai etis dan tanggung jawab sosial dalam pelayanan informasi. Pemahaman ini menjadi dasar bagi Pengelolaan dalam menyusun strategi layanan, mengelola koleksi, dan membangun hubungan yang inklusif dengan pemustaka. Sopian, Umar, dan Arifudin menekankan bahwa pengembangan kode etik pustakawan harus didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap prinsip-prinsip pelayanan, termasuk kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap hak pemustaka.<sup>15</sup> Sementara itu, Ariani dan Juvitasari menunjukkan bahwa pelaksanaan kode etik yang efektif sangat bergantung pada tingkat pemahaman pustakawan terhadap peran profesionalnya, yang mencakup kemampuan reflektif dalam menghadapi dilema layanan dan komitmen terhadap kualitas informasi.<sup>16</sup> Pemahaman yang mendalam memungkinkan Pengelolaan perpustakaan untuk tidak hanya menjalankan tugas secara prosedural, tetapi juga secara etis dan visioner, menjadikan perpustakaan sebagai ruang pembelajaran yang berkelanjutan dan bermakna bagi masyarakat.

---

<sup>14</sup>Andena, Yosefa, Albertus Pramoekti Narendra, and Anton Hermawan. "Etika Pustakawan dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Tunas Muda SMP Stella Matutina Salatiga." *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (2023): 285.

<sup>15</sup> Sopian, Imam, Abubakar Umar, and Yadi Fahmi Arifudin. "Pengembangan Kode Etik Pustakawan dalam Memberikan Pelayanan kepada Pemustaka." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 8 (2023): 3728.

<sup>16</sup> Suyanik, Yatim Riyanto, and Soedjarwo. "Efektifitas Pengelolaan Perpustakaan." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, no. 3 (2021): 1056–1065.

Pemahaman Pengelolaan perpustakaan juga berkaitan erat dengan efektivitas manajemen layanan informasi yang berorientasi pada kebutuhan komunitas. Suyanik, Riyanto, dan Soedjarwo menegaskan bahwa efektivitas Pengelolaan perpustakaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Pengelolaan dalam menumbuhkan budaya literasi, menciptakan ruang belajar yang ramah, serta menyajikan koleksi yang relevan dan beragam.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman bukan hanya soal penguasaan teknis, tetapi juga tentang sensitivitas terhadap dinamika sosial dan pedagogis di lingkungan perpustakaan. Di sisi lain, Wardhana, Aisyah, dan Laksmi menggarisbawahi pentingnya fungsi pengendalian dalam manajemen perpustakaan sebagai indikator pemahaman Pengelolaan terhadap proses kerja yang sistematis dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.<sup>18</sup> Mereka menyebut bahwa banyak perpustakaan di Indonesia belum memenuhi standar layanan karena lemahnya pengendalian internal, yang seharusnya menjadi bagian dari pemahaman strategis Pengelolaan terhadap tanggung jawab institusional.

Saparuddin dalam penelitiannya di UIN Alauddin Makassar juga menyoroti bahwa profesionalisme kerja Pengelolaan perpustakaan sangat ditentukan oleh kesadaran terhadap peran, fungsi, dan tujuan lembaga, serta pemahaman terhadap kode etik pustakawan dan regulasi kelembagaan.<sup>19</sup> Pemahaman yang komprehensif ini memungkinkan Pengelolaan untuk menjalankan tugas secara bertanggung

---

<sup>17</sup> Ariani, Dede Meiliya, and Prisca Juvitasari. "Pelaksanaan Kode Etik Pustakawan untuk Memaksimalkan Kualitas Layanan Perpustakaan SMP Negeri 1 Sumberrejo." *Tibannbaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 7, no. 1 (2023): 24–27.

<sup>18</sup> Wardhana, Arya Wijaya Pramodha, Sofia Nur Aisyah, and Laksmi. "Analisis Pengendalian dalam Fungsi Manajemen Perpustakaan pada Empat Jenis Perpustakaan di Indonesia." *Media Pustakawan* 30, no. 2 (2023): 87–98.

<sup>19</sup> Saparuddin. "Analisis Kinerja Pengelola Perpustakaan Berdasarkan Peran, Fungsi dan Tujuan Ditinjau dari Aspek Akademik dan Profesionalisme Kerja." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

jawab, adaptif, dan sesuai dengan nilai-nilai profesi pustakawan yang diatur oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Dengan demikian, pemahaman Pengelolaan perpustakaan di Indonesia harus dipandang sebagai kompetensi multidimensi yang mencakup aspek teknis, etis, manajerial, dan sosial, yang secara sinergis menentukan kualitas layanan dan keberlanjutan fungsi perpustakaan sebagai institusi publik.

## 2. Tujuan Pengelolaan Perpustakaan

Tujuan Pengelolaan perpustakaan adalah untuk menyediakan akses informasi yang berkualitas, mendukung kegiatan belajar dan penelitian, serta meningkatkan literasi informasi pengguna. Selain itu, Pengelolaan bertanggung jawab dalam pelestarian karya ilmiah dan pengembangan layanan berbasis teknologi agar perpustakaan menjadi pusat ilmu pengetahuan yang efektif dan berdaya guna.

Tujuan Pengelolaan perpustakaan tidak hanya terbatas pada penyediaan akses informasi, tetapi juga mencakup upaya strategis dalam membentuk perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Efektivitas Pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk menumbuhkan budaya literasi, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan, serta menjadikan perpustakaan sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak. Tujuan ini menekankan pentingnya perpustakaan sebagai ruang sosial yang mendukung keberlanjutan pembelajaran melalui penyediaan koleksi yang beragam dan strategi membaca yang fleksibel. Lebih lanjut, Pengelolaan perpustakaan juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan fungsi edukatif dan sosial

perpustakaan melalui pengembangan layanan berbasis teknologi, pelestarian karya ilmiah, serta penyediaan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks kelembagaan, tujuan Pengelolaan perpustakaan harus selaras dengan peran dan fungsi institusi, termasuk dalam hal profesionalisme kerja yang diatur oleh kode etik pustakawan dan regulasi organisasi. Hal ini mencakup kesadaran terhadap tanggung jawab moral, kemampuan dalam mengelola sumber daya informasi, serta komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Pengelolaan perpustakaan juga memiliki tujuan untuk memastikan fungsi manajerial berjalan optimal, termasuk dalam aspek pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Pengelolaan yang baik harus didukung oleh analisis kebutuhan, investasi teknologi informasi, dan pelatihan literasi digital bagi pustakawan dan pemustaka.

Selain itu, Pengelolaan perpustakaan juga bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) pustakawan agar mampu bekerja secara profesional dan etis. Hal ini mencakup pelatihan berkelanjutan, supervisi, penilaian kinerja, serta pembinaan karakter kerja yang berorientasi pada pelayanan dan integritas. Dengan demikian, Pengelolaan perpustakaan berperan strategis dalam menjamin keberlangsungan fungsi sosial, edukatif, dan transformasional perpustakaan di tengah masyarakat yang terus berkembang.

Pengelolaan perpustakaan juga bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) pustakawan agar mampu bekerja secara profesional dan etis. Hal ini mencakup pelatihan berkelanjutan, supervisi, dan penilaian kinerja. Dengan demikian, Pengelolaan perpustakaan berperan strategis dalam

menjamin keberlangsungan fungsi sosial dan edukatif perpustakaan di masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Manfaat Pengelolaan Perpustakaan

Manfaat utama dari keberadaan Pengelolaan perpustakaan yang kompeten adalah terciptanya manajemen perpustakaan yang efektif dan responsif terhadap perubahan zaman. Pengelolaan mampu menyesuaikan kebijakan perpustakaan dengan kebutuhan pengguna serta perkembangan teknologi informasi. Hal ini meningkatkan kepuasan pengguna dan memperkuat eksistensi perpustakaan sebagai pusat informasi dan pembelajaran.<sup>21</sup>

Manfaat lainnya adalah mendukung pengembangan sumber daya perpustakaan, baik dalam bentuk koleksi, layanan, maupun SDM. Pengelolaan dapat menjadi penggerak inovasi layanan, seperti digitalisasi koleksi dan sistem sirkulasi otomatis. Dengan begitu, perpustakaan menjadi lebih adaptif, inklusif, dan partisipatif dalam pembangunan literasi masyarakat.<sup>22</sup>

Manfaat keberadaan Pengelolaan perpustakaan yang kompeten tidak hanya tercermin dalam efektivitas manajemen internal, tetapi juga dalam kemampuan institusi untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman. Pengelolaan yang memahami dinamika kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi informasi mampu merancang kebijakan layanan yang relevan, fleksibel, dan berorientasi pada kepuasan pemustaka. Hal ini menjadikan perpustakaan bukan sekadar ruang

---

<sup>20</sup>Yusuf, Muhammad, dan Elva Rahmi. 2019. "Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 4 (2), hal. 130.

<sup>21</sup>Ginting, Rafika Zahara, Khoirul Jamil, and Yusniah. "Penerapan Etika Pustakawan dalam Pembentukan Karakter Budaya Kerja Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara." *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 140.

<sup>22</sup>Maulana, Muhammad Fauzan, and Nurhayani Nurhayani. "Analisis Sikap Pustakawan dalam Berinteraksi dengan Pemustaka Perpustakaan Sekolah Perguruan Islam." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 402.

penyimpanan informasi, melainkan pusat pembelajaran aktif yang mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan diri masyarakat.

Pengelolaan perpustakaan berperan penting dalam pengembangan sumber daya perpustakaan, baik dari segi koleksi, layanan, maupun sumber daya manusia. Mereka menjadi penggerak inovasi, seperti penerapan sistem sirkulasi otomatis, digitalisasi koleksi, dan integrasi layanan berbasis web yang memungkinkan akses informasi secara lebih luas dan cepat. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan layanan kepada komunitas yang sebelumnya kurang terlayani.

Manfaat lainnya adalah terciptanya lingkungan kerja yang profesional dan beretika, di mana Pengelolaan berperan sebagai pembina dan fasilitator bagi pustakawan dan staf lainnya. Melalui pelatihan berkelanjutan, supervisi yang konstruktif, dan evaluasi kinerja yang adil, Pengelolaan membantu membentuk tim kerja yang solid dan berkomitmen terhadap visi perpustakaan. Dalam konteks sosial, Pengelolaan juga berkontribusi pada pembangunan literasi masyarakat dengan menyelenggarakan program edukatif, kampanye membaca, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta komunitas lokal.

Dengan demikian, manfaat Pengelolaan perpustakaan tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga strategis dan transformatif. Mereka menjadi jembatan antara visi kelembagaan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus penjaga nilai-nilai profesi pustakawan yang menjadikan perpustakaan sebagai ruang yang hidup, relevan, dan bermakna.

#### 4. Indikator Pengelolaan Perpustakaan

Berdasarkan teori Spencer & Spencer, indikator pemahaman Pengelolaan perpustakaan meliputi:<sup>23</sup>

a. Pemahaman terhadap visi dan misi perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan yang efektif harus memiliki pemahaman mendalam terhadap arah strategis perpustakaan, mampu menerjemahkan visi dan misi ke dalam program kerja nyata, mengkomunikasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan dengan jelas, serta menyelaraskan seluruh aktivitas perpustakaan agar sejalan dengan tujuan organisasi induk, sehingga perpustakaan dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai sasaran institusional.

b. Kemampuan menyusun kebijakan layanan

Kemampuan ini mencakup keahlian dalam menganalisis kebutuhan pengguna melalui metode yang sistematis, merumuskan standar operasional prosedur yang komprehensif dan mudah diimplementasikan, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas layanan perpustakaan untuk memastikan responsivitas terhadap dinamika kebutuhan informasi pemustaka dan peningkatan kepuasan pengguna.

c. Keahlian dalam manajemen koleksi

Pengelolaan perpustakaan harus menguasai seluruh rangkaian proses Pengelolaan koleksi mulai dari seleksi dan akuisisi bahan pustaka yang relevan dengan kebutuhan pemustaka, pengolahan bahan pustaka sesuai standar bibliografis, pelaksanaan preservasi dan konservasi untuk menjaga

---

<sup>23</sup>Sopian, Imam, Abubakar Umar, and Yadi Fahmi Arifudin. "Pengembangan Kode Etik Pustakawan dalam Memberikan Pelayanan kepada Pemustaka." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 8 (2023): 3730.

keberlangsungan akses, hingga evaluasi koleksi secara berkala untuk memastikan kualitas, keterbaruan, dan relevansi koleksi perpustakaan.

d. Pemanfaatan teknologi informasi

Indikator ini mencerminkan kemampuan Pengelolaan perpustakaan dalam mengadopsi dan mengadaptasi teknologi informasi untuk mengoptimalkan layanan perpustakaan, termasuk mengoperasikan sistem otomasi perpustakaan untuk efisiensi operasional, mengimplementasikan layanan perpustakaan digital untuk memperluas jangkauan akses, serta memanfaatkan berbagai platform teknologi untuk mendiseminasikan informasi kepada pengguna secara efektif.

e. Kepemimpinan berorientasi pelayanan

Pengelolaan perpustakaan yang kompeten mampu menginspirasi dan memotivasi staf untuk memberikan layanan prima kepada pengguna, menyelesaikan berbagai masalah layanan dengan pendekatan yang efektif dan berpusat pada pengguna, mengembangkan budaya organisasi yang memprioritaskan kepuasan pengguna, serta mengelola perubahan dalam lingkungan perpustakaan dengan adaptif untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi layanan perpustakaan.

Sementara indikator lainnya menurut Henry Fayol, indikator tersebut termasuk dalam fungsi manajerial. Fayol mengidentifikasi lima fungsi utama manajemen, yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),

pengarahan (commanding), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (controlling).<sup>24</sup>

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan fondasi utama dalam Pengelolaan perpustakaan yang efektif dan berkelanjutan. Kemampuan Pengelolaan perpustakaan dalam merumuskan rencana strategis dan operasional mencerminkan tingkat pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan kelembagaan. Perencanaan tidak hanya mencakup penentuan arah kebijakan, tetapi juga identifikasi kebutuhan pengguna, analisis kekuatan dan kelemahan internal, serta proyeksi terhadap peluang dan tantangan eksternal. Dalam praktiknya, perencanaan melibatkan penyusunan program kerja tahunan, pengembangan layanan berbasis teknologi, serta penetapan indikator kinerja yang terukur.

Pengelolaan yang memiliki kompetensi perencanaan yang baik akan mampu menyusun kebijakan layanan yang responsif terhadap perubahan zaman, seperti digitalisasi koleksi, pengembangan literasi informasi, dan integrasi sistem informasi perpustakaan. Selain itu, perencanaan juga mencakup aspek penganggaran, Pengelolaan risiko, dan penjadwalan kegiatan yang mendukung efisiensi operasional. Perencanaan yang matang memungkinkan perpustakaan berfungsi sebagai pusat informasi yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam konteks etika profesi, perencanaan juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan akses, kerahasiaan informasi, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan.

---

<sup>24</sup>Andena, Yosefa, Albertus Pramoekti Narendra, and Anton Hermawan. "Etika Pustakawan dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Tunas Muda SMP Stella Matutina Salatiga." *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 4 (2023): 281.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan proses penting dalam memastikan bahwa seluruh sumber daya perpustakaan—baik manusia, koleksi, maupun teknologi—dikelola secara sistematis dan efisien. Kemampuan Pengelolaan perpustakaan dalam mengatur struktur organisasi mencerminkan pemahaman terhadap fungsi-fungsi kerja, alur komunikasi, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Pengorganisasian melibatkan penetapan unit kerja, penugasan staf sesuai kompetensi, serta pengembangan sistem koordinasi dan supervisi yang mendukung kolaborasi antar bagian.

Dalam Pengelolaan modern, pengorganisasian juga mencakup integrasi teknologi informasi untuk mendukung sistem layanan, seperti katalog daring, sistem sirkulasi otomatis, dan pemantauan statistik penggunaan. Pengelolaan yang mampu mengorganisasi dengan baik akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, transparan, dan produktif. Selain itu, pengorganisasian yang efektif memungkinkan perpustakaan beradaptasi dengan perubahan struktur kelembagaan, tuntutan pengguna, dan perkembangan kebijakan nasional di bidang informasi dan literasi.

Pengorganisasian juga memiliki dimensi etis, di mana Pengelolaan perlu memastikan bahwa pembagian tugas dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan mendukung pengembangan profesional pustakawan. Hubungan kerja antar unit harus dibangun atas dasar saling menghargai, keterbukaan, dan komitmen terhadap tujuan bersama. Dengan demikian, pengorganisasian bukan hanya soal struktur, tetapi juga tentang membangun budaya kerja yang sehat dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu.

c. *Actuating* (Penggerakan)

Kemampuan Pengelolaan perpustakaan dalam memimpin, memotivasi, dan berkomunikasi dengan staf perpustakaan untuk melaksanakan tugas sesuai rencana, termasuk memberikan arahan, bimbingan, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Seorang Pengelolaan yang mampu memotivasi staf melalui komunikasi yang terbuka, 4ik, dan konstruktif akan lebih berhasil dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Dalam konteks perpustakaan, di mana kolaborasi dan pelayanan menjadi inti operasional, gaya kepemimpinan yang partisipatif dan transformatif sangat diperlukan untuk mendorong keterlibatan aktif staf dalam pencapaian tujuan institusi. Selain itu, Pengelolaan perlu memiliki kecakapan dalam mengidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan profesional staf, sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat melalui pelatihan, mentoring, atau pembagian tugas yang sesuai.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Kemampuan Pengelolaan perpustakaan dalam memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja perpustakaan, serta melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan dari standar atau rencana yang telah ditetapkan untuk menjamin tercapainya tujuan perpustakaan. Untuk menjamin tercapainya tujuan perpustakaan, Pengelolaan dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dari standar atau rencana kerja yang telah ditetapkan. Tindakan korektif ini harus didasarkan pada hasil evaluasi yang objektif dan terukur, serta mempertimbangkan konteks operasional dan kebutuhan pengguna.

C. Kode Etik Pustakawan

1. Pengertian Kode Etik Pustakawan

Menurut KBBI, kode etik adalah norma dan aturan etis yang dijadikan pedoman dalam menjalankan profesi. Dalam konteks pustakawan, kode etik adalah seperangkat prinsip moral dan profesional yang mengatur perilaku pustakawan dalam menjalankan tugasnya, pemahaman pustakawan terhadap kode etik menunjukkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab profesi, terutama dalam menjalin hubungan antar pustakawan.<sup>25</sup>

Teori Paulo Freire tentang tingkat kesadaran (naif, magis, kritis) digunakan untuk menganalisis pemahaman pustakawan terhadap kode etik. Misalnya, pemahaman terhadap kerja sama tim, keadilan sistem kerja, dan menjaga nama baik rekan berada pada tingkat kesadaran kritis, yang berarti pustakawan menyadari pentingnya nilai etika sebagai bagian dari identitas profesi. Maka dari itu, pengertian kode etik bukan sekadar aturan tertulis, melainkan juga nilai-nilai moral yang diinternalisasi dalam perilaku profesional.<sup>26</sup>

Dalam kerangka pemikiran Paulo Freire, tingkat kesadaran manusia diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: kesadaran naif, magis, dan kritis. Ketika teori ini diterapkan dalam konteks pemahaman pustakawan terhadap kode etik profesi, dapat terlihat bahwa tingkat kesadaran kritis merupakan indikator tertinggi dari internalisasi nilai-nilai etika. Pustakawan yang berada pada tingkat kesadaran kritis tidak hanya memahami aturan tertulis dalam kode etik, tetapi juga menghayati nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya sebagai bagian integral dari identitas profesional. Misalnya, kesadaran akan pentingnya kerja sama tim, keadilan dalam

---

<sup>25</sup>Lubis, Abdul Rahman. 2018. "Penerapan Etika Pustakawan dalam Pembentukan Karakter Budaya Kerja Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 3 (1), hal. 58.

<sup>26</sup>Yusuf, Muhammad, dan Elva Rahmi. 2019. "Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang." *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 4 (2), hal. 151.

sistem kerja, dan komitmen untuk menjaga nama baik rekan sejawat mencerminkan pemahaman yang melampaui kepatuhan formal terhadap regulasi.

Kode etik pustakawan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi profesi dalam struktur kelembagaan. Dalam perspektif institusional, kode etik merupakan bagian dari regulasi normatif yang membentuk identitas profesi pustakawan sebagai aktor dalam sistem informasi publik. Ia berfungsi sebagai pengatur ruang gerak, penentu batas tanggung jawab, dan penegas nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas profesi. Kode etik menjadi alat kontrol sosial yang memastikan bahwa pustakawan bertindak sesuai dengan harapan masyarakat, menjaga integritas layanan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Secara sosiologis, kode etik juga mencerminkan relasi antara pustakawan dan lingkungan sosialnya. Ia menuntut pustakawan untuk bersikap inklusif, menghormati keragaman latar belakang pengguna, serta menjunjung tinggi hak atas informasi. Dalam praktiknya, pustakawan dituntut untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, menghormati hak milik intelektual, dan memberikan layanan yang adil tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kode etik bukan hanya seperangkat aturan formal, tetapi juga cerminan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam profesi pustakawan.

Lebih jauh, kode etik pustakawan memiliki dimensi pedagogis yang penting, terutama dalam membentuk karakter dan sikap profesional pustakawan sejak masa pendidikan. Ia menjadi bagian dari kurikulum pembinaan etika profesi, yang menanamkan prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, kejujuran, empati, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Dalam konteks ini, kode etik berfungsi sebagai alat pembentukan identitas moral pustakawan, yang tidak hanya memahami tugasnya secara teknis, tetapi juga menghayati makna sosial dan etis dari setiap tindakan profesional.

Kode etik pustakawan merupakan ketentuan yang mengatur profesi pustakawan dalam melaksanakan tugas profesinya. Tujuannya untuk membina karakter, mengawasi tingkah laku, mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota profesi dan pemustaka, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan mengangkat citra pustakawan.

Kode Etik Pustakawan disebut ASTA ETIKA PUSTAKAWAN INDONESIA, terdiri dari :

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan harapan pemustaka.
- b. Mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi-tingginya
- c. Membedakan antara pandangan pribadi dan tugas profesi
- d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan professional
- e. Menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi dan menyediakan akses tak terbatas
- f. Melindungi hak privasi pemustaka dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi
- g. Mengakui dan menghormati hak milik atas kekayaan intelektual
- h. Menjalin kerjasama dengan teman sejawat dan saling menghargai

Kode Etik Pustakawan merupakan seperangkat prinsip moral dan pedoman perilaku profesional yang ditetapkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) untuk mengarahkan sikap dan tindakan pustakawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik ini mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, keadilan, integritas, dan penghormatan terhadap hak pemustaka dalam mengakses informasi.

Namun, pemahaman pustakawan terhadap kode etik tidak bersifat seragam. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, budaya organisasi, serta intensitas pelatihan yang diterima. Sebagian pustakawan menunjukkan pemahaman yang baik terhadap prinsip tanggung jawab dan keadilan, tetapi belum sepenuhnya memahami atau menginternalisasi nilai-nilai etika lainnya seperti sikap ramah dan perlindungan data pemustaka. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kode etik bukan hanya soal mengetahui isi dokumen, tetapi juga kemampuan untuk menerapkannya secara konsisten dalam praktik kerja.

## 2. Tujuan Kode Etik Pustakawan

Tujuan utama dari kode etik pustakawan adalah untuk menjaga integritas profesi dan meningkatkan kualitas layanan kepada pemustaka. Kode etik pustakawan memiliki acuan moral dalam bersikap dan bertindak, baik terhadap pengguna layanan, rekan kerja, maupun lembaga tempat ia bekerja. Hal ini juga menjadi dasar untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi perpustakaan.<sup>27</sup>

Selain itu, kode etik bertujuan untuk menciptakan standar perilaku profesional yang seragam di antara pustakawan. Dengan adanya kesepakatan bersama, pustakawan dapat bekerja dalam suasana kolegiat dan bertanggung jawab. Tujuan ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya budaya kerja yang sehat dan berorientasi pada pelayanan berkualitas tinggi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Ariani, Dede Meiliya, and Prisca Juvitasari. "Pelaksanaan Kode Etik Pustakawan untuk Memaksimalkan Kualitas Layanan Perpustakaan SMP Negeri 1 Sumberrejo." *Tibandaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 7, no. 1 (2023): 26.

<sup>28</sup>Ginting, Rafika Zahara, Khoirul Jamil, and Yusniah. "Penerapan Etika Pustakawan dalam Pembentukan Karakter Budaya Kerja Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara." *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 145.

Tujuan utama dari Kode Etik Pustakawan tentunya untuk menjaga martabat profesi, menjamin layanan informasi yang adil dan berkualitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpustakaan. Kode etik berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing pustakawan dalam menghadapi dilema profesional dan menjaga integritas dalam pelayanan.

Namun, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila pustakawan mendapatkan pelatihan yang memadai dan pengawasan yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kode etik masih minim dan pengawasan internal belum berjalan optimal. Akibatnya, penerapan nilai-nilai etika dalam layanan belum konsisten. Oleh karena itu, pencapaian tujuan kode etik harus didukung oleh sistem kelembagaan yang aktif dalam membina dan mengawasi pustakawan secara berkala.

### 3. Fungsi Kode Etik Pustakawan

Fungsi utama kode etik pustakawan adalah sebagai panduan perilaku profesional yang etis. Fungsi ini mencakup perlindungan terhadap hak dan kewajiban pustakawan, perlindungan terhadap pemustaka, serta sebagai alat kontrol sosial dalam praktik kerja. Dengan adanya kode etik, pustakawan dapat mempertimbangkan dampak etis dari setiap keputusan atau tindakan yang diambil dalam tugasnya.<sup>29</sup>

Fungsi lainnya adalah meningkatkan profesionalisme pustakawan melalui penguatan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan loyalitas terhadap profesi. Penerapan kode etik berperan penting dalam meningkatkan integritas pustakawan, yang tercermin dari konsistensi perilaku, kepatuhan terhadap aturan, serta komitmen terhadap pengembangan diri.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Maulana, Muhammad Fauzan, and Nurhayani Nurhayani. "Analisis Sikap Pustakawan dalam Berinteraksi dengan Pemustaka Perpustakaan Sekolah Perguruan Islam." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2023): 403.

<sup>30</sup>Ginting, Rafika Zahara, Khoirul Jamil, and Yusniah. "Penerapan Etika Pustakawan dalam Pembentukan Karakter Budaya Kerja Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara." *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 145.

Selain sebagai panduan perilaku profesional, kode etik pustakawan juga berfungsi sebagai instrumen pembentuk budaya kerja yang sehat dan berintegritas. Ia membantu menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan saling menghormati. Dalam praktiknya, kode etik mendorong pustakawan untuk bersikap terbuka terhadap kritik, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan. Fungsi ini sangat penting dalam membangun kepercayaan antar rekan kerja dan antara pustakawan dengan pemustaka.

Kode etik juga berfungsi sebagai alat edukasi dan internalisasi nilai profesi sejak dini. Dalam pendidikan kepustakawanan, kode etik dikenalkan sebagai bagian dari pembentukan identitas profesional, yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk sikap moral dan tanggung jawab sosial. Pustakawan yang memahami dan menghayati kode etik sejak masa pendidikan akan lebih siap menghadapi tantangan etis dalam praktik kerja, seperti menjaga kerahasiaan informasi, menghindari bias dalam pelayanan, dan menegakkan hak atas akses informasi.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan, fungsi kode etik semakin relevan sebagai penyeimbang antara efisiensi sistem dan nilai-nilai kemanusiaan. Pustakawan dituntut untuk tidak hanya menguasai perangkat digital, tetapi juga mampu menilai dampak etis dari penggunaan teknologi tersebut. Misalnya, dalam Pengelolaan data pengguna, pustakawan harus memastikan bahwa privasi dan keamanan informasi tetap terjaga sesuai dengan prinsip etika profesi.

Secara fungsional, kode etik pustakawan berperan sebagai pedoman kerja yang mengarahkan pustakawan dalam menjalankan tugas secara profesional, adil, dan bertanggung jawab. Kode etik juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap perilaku

kerja pustakawan, serta sebagai dasar dalam membangun budaya pelayanan yang berintegritas.

Namun, fungsi ini belum berjalan optimal apabila nilai-nilai etika tidak diinternalisasi secara mendalam oleh pustakawan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian pustakawan masih berorientasi pada aspek teknis seperti pengelolaan koleksi dan sistem katalog, sementara nilai-nilai etika seperti sikap ramah, komunikasi terbuka, dan perlindungan data belum menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, fungsi kode etik harus dipahami bukan hanya sebagai aturan formal, tetapi sebagai nilai-nilai kerja yang hidup dalam keseharian pustakawan.

#### 4. Indikator Kode Etik Pustakawan

Indikator keberhasilan penerapan kode etik pustakawan dapat dilihat dari perilaku sehari-hari di tempat kerja. Ini termasuk sikap jujur dalam pelayanan, menghormati privasi dan hak pemustaka, kemampuan bekerja sama secara adil dan profesional, serta ketaatan terhadap aturan organisasi. Pustakawan yang memahami dan menerapkan kode etik dengan baik cenderung menunjukkan integritas tinggi dan kepedulian terhadap kualitas layanan. Berdasarkan teori tingkat kesadaran Paulo Freire, indikator pemahaman kode etik pustakawan meliputi:<sup>31</sup>

##### a. Kesadaran Magis

Pada tingkat kesadaran magis, pustakawan menerima kode etik secara pasif sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi tanpa mempertanyakan atau memahami maknanya secara mendalam. Mereka cenderung memisahkan kode etik dari realitas pekerjaan sehari-hari, melihatnya sebagai formalitas belaka, dan mematuhi terutama karena takut akan sanksi atau hukuman,

---

<sup>31</sup>Lubis, Abdul Rahman. 2018. "Penerapan Etika Pustakawan dalam Pembentukan Karakter Budaya Kerja Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 3 (1), hal. 160.

bukan karena penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pustakawan dengan kesadaran magis belum mampu mengaitkan kode etik dengan kondisi sosial yang lebih luas dalam profesi kepustakawanan.

b. Kesadaran Naif

Pustakawan dengan kesadaran naif mulai memahami kode etik namun masih secara parsial dan terfragmentasi tanpa melihat konteks yang lebih luas. Mereka cenderung menafsirkan kode etik secara teknis dan prosedural tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai profesional yang mendasarinya. Pada tingkat ini, pustakawan sering menganggap pelanggaran etika sebagai masalah individual atau kesalahan pribadi, bukan sebagai gejala dari permasalahan sistemik dalam profesi atau institusi perpustakaan, sehingga solusi yang diusulkan pun bersifat superfisial.

c. Kesadaran Kritis

Pustakawan dengan kesadaran kritis memahami kode etik sebagai manifestasi dari nilai-nilai inti yang membentuk identitas profesi kepustakawanan. Mereka tidak sekadar mematuhi butir-butir kode etik, tetapi menginternalisasikannya dalam perilaku profesional sehari-hari, mengaplikasikan prinsip kerja sama tim dan keadilan dalam sistem kerja, serta secara aktif menjaga nama baik rekan seprofesi sebagai tanggung jawab kolektif. Pada tingkat kesadaran ini, pustakawan mampu mengkritisi dan mengembangkan kode etik sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta menjadikannya sebagai landasan untuk transformasi layanan perpustakaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator pemahaman terhadap kode etik pustakawan mencakup sejumlah aspek utama yang merefleksikan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan

informasi. Aspek-aspek tersebut meliputi tanggung jawab dalam menjalankan tugas, keadilan dalam memberikan layanan kepada pemustaka, integritas dalam menjaga kerahasiaan informasi, sikap ramah dan komunikatif dalam interaksi, serta komitmen terhadap pengembangan profesional secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, indikator tanggung jawab dan keadilan telah cukup dipahami oleh pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie, namun pemahaman terhadap aspek lain seperti perlindungan data pemustaka dan sikap ramah masih tergolong lemah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kode etik tidak dapat diukur hanya secara teoritis, melainkan harus dievaluasi melalui praktik kerja pustakawan di lapangan. Oleh karena itu, pengukuran indikator kode etik perlu mempertimbangkan konteks kelembagaan, budaya kerja yang berlaku, serta dukungan pelatihan dan pembinaan yang tersedia secara institusional.

Sementara indikator lainnya oleh Sopian menunjukkan bahwa indikator juga bisa mencakup:<sup>32</sup>

- a. Pertama, partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat dan literasi menjadi indikator penting yang menunjukkan peran pustakawan sebagai agen perubahan sosial. Pengelolaan perpustakaan yang terlibat dalam program literasi, pelatihan, atau kegiatan edukatif lainnya menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat. Keterlibatan ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan perpustakaan, tetapi juga memperkuat posisi pustakawan sebagai fasilitator pembelajaran sepanjang hayat. Dalam konteks ini, pemahaman pustakawan tercermin melalui kepekaan sosial,

---

<sup>32</sup>Sopian, Imam, Abubakar Umar, and Yadi Fahmi Arifudin. "Pengembangan Kode Etik Pustakawan dalam Memberikan Pelayanan kepada Pemustaka." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 8 (2023): 3732.

kemampuan berkolaborasi lintas sektor, serta inisiatif dalam merancang program literasi yang relevan dan inklusif.

- b. Kedua, kemampuan menjaga etika komunikasi menjadi indikator yang mencerminkan profesionalisme pustakawan dalam berinteraksi dengan pemustaka maupun sesama rekan kerja. Etika komunikasi meliputi sikap sopan, terbuka, jujur, dan menghormati hak setiap individu dalam proses pertukaran informasi. Pengelolaan perpustakaan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip komunikasi etis akan mampu menciptakan suasana layanan yang nyaman, menghargai keragaman latar belakang pengguna, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman atau konflik interpersonal. Dalam era digital, etika komunikasi juga mencakup kemampuan menyampaikan informasi secara akurat dan bertanggung jawab melalui media daring, menjaga privasi data pengguna, serta menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan.
- c. Ketiga, kemampuan menyikapi konflik secara bijak menjadi indikator yang menggambarkan kedewasaan emosional dan integritas pustakawan dalam menghadapi tantangan kerja. Konflik dalam lingkungan perpustakaan dapat muncul dalam bentuk perbedaan pendapat, tekanan operasional, atau ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik. Pengelolaan yang memiliki pemahaman etis dan reflektif akan mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang adil, tenang, dan mengedepankan dialog serta kode etik profesi. Sikap ini menunjukkan bahwa pemahaman bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang karakter dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan informasi.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tingkat pemahaman Pengelolaan perpustakaan terhadap kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie.<sup>33</sup> Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengkaji fenomena sosial secara kontekstual dan holistik, dengan fokus pada makna subjektif yang dibentuk oleh individu dalam lingkungan kerja kelembagaan.<sup>34</sup> Dalam konteks ini, pemahaman terhadap kode etik tidak hanya dilihat sebagai pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai profesional yang diwujudkan dalam tindakan dan keputusan pustakawan.<sup>35</sup>

Metode deskriptif digunakan untuk menyusun gambaran faktual dan sistematis mengenai bagaimana prinsip-prinsip etika seperti tanggung jawab, integritas, keadilan, dan profesionalisme dipahami diimplementasikan oleh Pengelolaan perpustakaan.<sup>36</sup> Melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, proses eksplorasi terhadap pemahaman etis dilakukan secara menyeluruh dan berlapis.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017. hlm. 6

<sup>34</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019. hlm.21

<sup>35</sup> Nur'aini & Laila Hadri Nasution. "Kode Etik Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan." *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, Vol. 9, No. 2, 2021. hlm.18

<sup>36</sup> Pranata, Aldi & Krismayani, Ika. "Penerapan Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro." *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 7, No. 2, 2020. hlm.2

<sup>37</sup> Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2020. hlm. 45

Metode deskriptif juga memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa-nuansa yang tidak selalu terungkap melalui angka atau statistik, seperti ekspresi sikap, nilai-nilai yang dianut, serta dinamika komunikasi antar pustakawan. Dalam penelitian etis, pendekatan ini sangat relevan karena mampu mengungkap bagaimana prinsip moral diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, bukan sekadar dipahami secara teoritis. Dengan demikian, metode deskriptif tidak hanya menyajikan data, tetapi juga membangun narasi yang bermakna tentang realitas kerja pustakawan.

Selain itu, metode ini memberikan fleksibilitas dalam menjangkau berbagai sumber informasi, baik verbal maupun non-verbal. Peneliti dapat mengamati gestur, pola interaksi, dan suasana kerja yang mencerminkan pemahaman etis secara implisit. Teknik triangulasi data juga dapat diterapkan untuk meningkatkan validitas temuan, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh gambaran yang utuh dan konsisten.

Dalam konteks skripsi ini, metode deskriptif berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, antara nilai-nilai etika yang dirumuskan secara normatif dan kenyataan implementasi di lapangan. Ia membuka ruang bagi analisis yang tidak hanya menjelaskan “apa yang terjadi,” tetapi juga “mengapa hal itu terjadi” dan “bagaimana nilai-nilai etika dihayati dalam konteks kelembagaan.” Dengan pendekatan ini, pemahaman pustakawan terhadap kode etik dapat ditelusuri secara mendalam, menyentuh aspek kognitif, afektif, dan struktural yang membentuk perilaku profesional mereka.

Rancangan ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya menggambarkan tingkat pemahaman terhadap kode etik pustakawan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemaknaan dan penerapannya

dalam praktik kepastakawanan.<sup>38</sup> Faktor-faktor tersebut dapat mencakup latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, budaya organisasi, dukungan kelembagaan, serta dinamika hubungan antar pustakawan dan pemustaka. Dengan pendekatan yang menyeluruh, penelitian ini berupaya menangkap bagaimana nilai-nilai etika dipahami secara personal dan kolektif, serta bagaimana konteks sosial dan struktural memengaruhi cara pustakawan menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam tugasnya.

Lebih jauh, rancangan ini juga membuka ruang untuk memahami adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap kode etik dan praktik aktual di lapangan. Melalui eksplorasi mendalam, diharapkan muncul gambaran yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif terhadap tantangan, hambatan, dan potensi penguatan etika profesi pustakawan di lingkungan kerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori kepastakawanan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan profesionalisme dan integritas pustakawan dalam konteks kelembagaan yang dinamis.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan budaya etis dalam Pengelolaan perpustakaan daerah, serta menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan kelembagaan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai profesionalisme pustakawan.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 15 hari, dimulai pada tanggal 1 Agustus – 15 Agustus 2025. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Adapun lokasi yang menjadi

---

<sup>38</sup> Yuni Sara. "Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam Meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong." *Skripsi*, IAIN Curup, 2025. hlm.134

objek dalam penelitian ini adalah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie yang beralamat di Jl. Teuku Chik Di Tiro No. 1, Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh.

Alasan mengambil lokasi ini karena dekat dengan tempat tinggal peneliti, kemudian pada perpustakaan tersebut masih memiliki keterbatasan tentang pemahaman kode etik pustakawan, sehingga perlu diteliti untuk memastikan layanan tetap berjalan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.

### C. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian juga dapat diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti atau dianalisis berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh tenaga pustakawan yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, khususnya yang memiliki peran langsung dalam pelaksanaan layanan perpustakaan dan penerapan kode etik profesi pustakawan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa hanya terdapat 4 orang pustakawan aktif yang bertugas di institusi tersebut. Pustakawan tersebut seluruhnya adalah perempuan dan memiliki tanggung jawab langsung dalam kegiatan layanan informasi dan Pengelolaan koleksi. Dalam hal ini, peneliti memilih seluruh pustakawan yang aktif bertugas sebagai informan, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam praktik kepustakawanan serta pemahaman terhadap kode etik profesi pustakawan.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, ... 117.

Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri atas 4 orang pustakawan yang seluruhnya berperan aktif dalam kegiatan layanan perpustakaan. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan prinsip kecukupan informasi dan relevansi dengan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh diharapkan bersifat mendalam dan kontekstual.

#### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Pembagian ini bertujuan untuk memperjelas asal-usul informasi yang digunakan dalam proses analisis dan interpretasi terhadap pemahaman pustakawan mengenai kode etik profesi.

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 4 orang pustakawan perempuan yang aktif bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie. Informasi yang dikumpulkan mencakup pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip kode etik profesi, pengalaman dalam menerapkan nilai-nilai etika dalam layanan informasi, serta tantangan dan dilema etis yang dihadapi dalam praktik kerja. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas pustakawan di lingkungan kerja, yang memberikan konteks faktual dan perilaku nyata dalam pelaksanaan tugas kepustakawanan.

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,...hlm. 104.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan digunakan untuk mendukung atau memperkaya analisis.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen institusional seperti struktur organisasi perpustakaan, uraian tugas pustakawan, pedoman kerja, standar operasional prosedur (SOP), serta kebijakan internal yang berkaitan dengan penerapan etika profesi. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai etika tercermin dalam kebijakan dan praktik kelembagaan.

## 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang bersifat referensial dan digunakan sebagai acuan konseptual atau teoritis dalam menyusun kerangka berpikir dan landasan metodologis penelitian. Dalam penelitian ini, data tersier mencakup buku-buku metodologi penelitian kualitatif, literatur tentang etika profesi pustakawan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan pendekatan yang digunakan. Data tersier berfungsi untuk memperkuat argumentasi teoritis dan memberikan konteks akademik terhadap temuan lapangan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam dan kontekstual mengenai pemahaman pustakawan terhadap kode etik profesi. Peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga

---

<sup>41</sup> Hasan, M. I. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 83.

teknik ini digunakan secara komplementer dan saling mendukung untuk memperoleh data yang kaya dan bermakna.<sup>42</sup>

### 1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie sebagai lokasi penelitian. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti berperan sebagai pengamat yang mencatat secara sistematis berbagai aspek yang relevan dengan fokus penelitian. Aspek yang diamati meliputi struktur organisasi, interaksi antara pustakawan dan pemustaka, praktik kerja harian, serta dinamika institusional yang mencerminkan penerapan nilai-nilai etika profesi pustakawan. Observasi dilakukan sebelum pelaksanaan wawancara untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi lapangan dan untuk mengidentifikasi informan yang relevan.<sup>43</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap 4 orang pustakawan perempuan yang aktif bertugas di institusi tersebut. Jumlah informan ditentukan berdasarkan hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa hanya terdapat 4 pustakawan yang secara aktif menjalankan tugas layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie. Oleh karena itu, seluruh pustakawan yang memenuhi kriteria relevansi dijadikan informan dalam penelitian ini.

Topik yang dibahas meliputi pemahaman informan terhadap kode etik profesi pustakawan, pengalaman dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dalam layanan informasi, serta tantangan dan dilema etis yang dihadapi dalam praktik kerja. Wawancara dilakukan secara tatap muka, direkam dengan persetujuan informan, dan kemudian ditranskrip secara verbatim untuk dianalisis. Pemilihan informan

---

<sup>42</sup> Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 54.

<sup>43</sup> Sanjaya, Wina. *Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 89.

dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian.

### 3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh. Dokumen yang dikaji meliputi struktur organisasi, uraian tugas pustakawan, pedoman kerja, standar operasional prosedur (SOP), serta dokumen internal yang berkaitan dengan penerapan kode etik profesi. Analisis dokumen dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai etika profesi tercermin dalam kebijakan dan praktik institusional. Teknik dokumentasi berfungsi sebagai alat triangulasi untuk meningkatkan kredibilitas data dan memperkuat interpretasi hasil penelitian.<sup>44</sup>

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang menekankan pada proses pemahaman mendalam terhadap makna, pola, dan dinamika pemahaman pustakawan terhadap kode etik profesi dalam konteks institusional. Proses analisis berlangsung sejak data mulai dikumpulkan dan dilakukan secara berkesinambungan selama pelaksanaan penelitian, dengan tujuan untuk membangun interpretasi yang utuh dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.<sup>45</sup>

Model analisis data yang digunakan mengacu pada teknik interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari 4 langkah utama, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

---

<sup>44</sup> Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 35.

<sup>45</sup> Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*...hlm. 248

## 1. Pengumpulan Data

Informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 4 orang pustakawan perempuan, observasi langsung di lokasi penelitian, serta kajian dokumentasi institusional. Setiap data dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri atas dua bagian, yaitu catatan deskriptif (berisi hasil pengamatan secara faktual) dan catatan reflektif (berisi kesan, penilaian, serta tafsiran awal terhadap peristiwa yang diamati).

## 2. Reduksi Data

Data yang terkumpul disaring dan dipilah untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang paling relevan dengan fokus penelitian. Proses ini membantu menyederhanakan data, membuang informasi yang tidak diperlukan, serta menyusun pola temuan agar lebih mudah ditelaah lebih lanjut. Reduksi dilakukan secara tematik, dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori seperti pemahaman terhadap prinsip etika, pengalaman profesional, dan tantangan institusional.

## 3. Penyajian Data

Informasi penting disusun dalam bentuk narasi tematik yang sistematis, serta didukung oleh kutipan langsung dari informan, tabel ringkasan, atau bagan sederhana untuk memudahkan pembacaan dan penarikan makna. Penyajian ini memungkinkan penelusuran data secara terstruktur dan memfasilitasi interpretasi yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

## 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Makna-makna yang muncul dari data ditafsirkan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai penerapan kode etik profesi pustakawan. Kesimpulan diuji melalui konsistensi temuan, keterhubungan antar data, serta relevansinya dengan fokus penelitian. Verifikasi dilakukan melalui teknik

triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie

Sejarah kelembagaan perpustakaan di Kabupaten Pidie mengalami beberapa transformasi sejak awal pendiriannya. Pada tahun 1983, lembaga ini dikenal sebagai Perpustakaan Daerah Tingkat II Pidie. Kemudian, pada tahun 1990, terjadi perubahan status menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Umum Daerah Tingkat II Pidie. Memasuki tahun 2001, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Nomor 24 Tahun 2001, institusi ini berganti nama menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pidie. Perubahan struktur organisasi kembali dilakukan melalui Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2008 yang mengatur tentang susunan dan tata kerja lembaga teknis daerah. Terakhir, sejak Februari 2017, sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Pidie Nomor 19 Tahun 2017, lembaga ini resmi beroperasi sebagai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie.<sup>46</sup>

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie berfungsi sebagai unit pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Dalam menjalankan perannya, dinas ini secara rutin melakukan pengembangan fasilitas, seperti penambahan koleksi buku, rak, meja, dan kursi baca, serta pemeliharaan jaringan LAN untuk mendukung akses informasi. Selain itu, dinas ini

---

<sup>46</sup> Data Bagian Humas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie Tahun 2025

aktif menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, khususnya pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, guna memperluas jangkauan layanan literasi. Saat ini, kepemimpinan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie berada di bawah T. Syihabuddin, S.Sos, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pegawai Nomor 821.23/70/2007. Gedung dinas berdiri di atas lahan seluas 2.685 meterpersegi, dengan bangunan permanen berukuran 28 x 18 meter yang terdiri dari dua lantai.<sup>47</sup>

## 2. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie

Dalam mengoperasionalkan kegiatannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie memiliki visi dan misi yang hampir sama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh yaitu sebagai berikut: <sup>48</sup>

### a. Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie yaitu:

“Terwujudnya Layanan Perpustakaan dan Arsip yang Prima sebagai Pusat Informasi, Dokumentasi dan Pembelajaran Bagi Masyarakat Pidie”

### b. Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Adapun misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan minat baca masyarakat.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan Kearsipan.
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## 3. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie

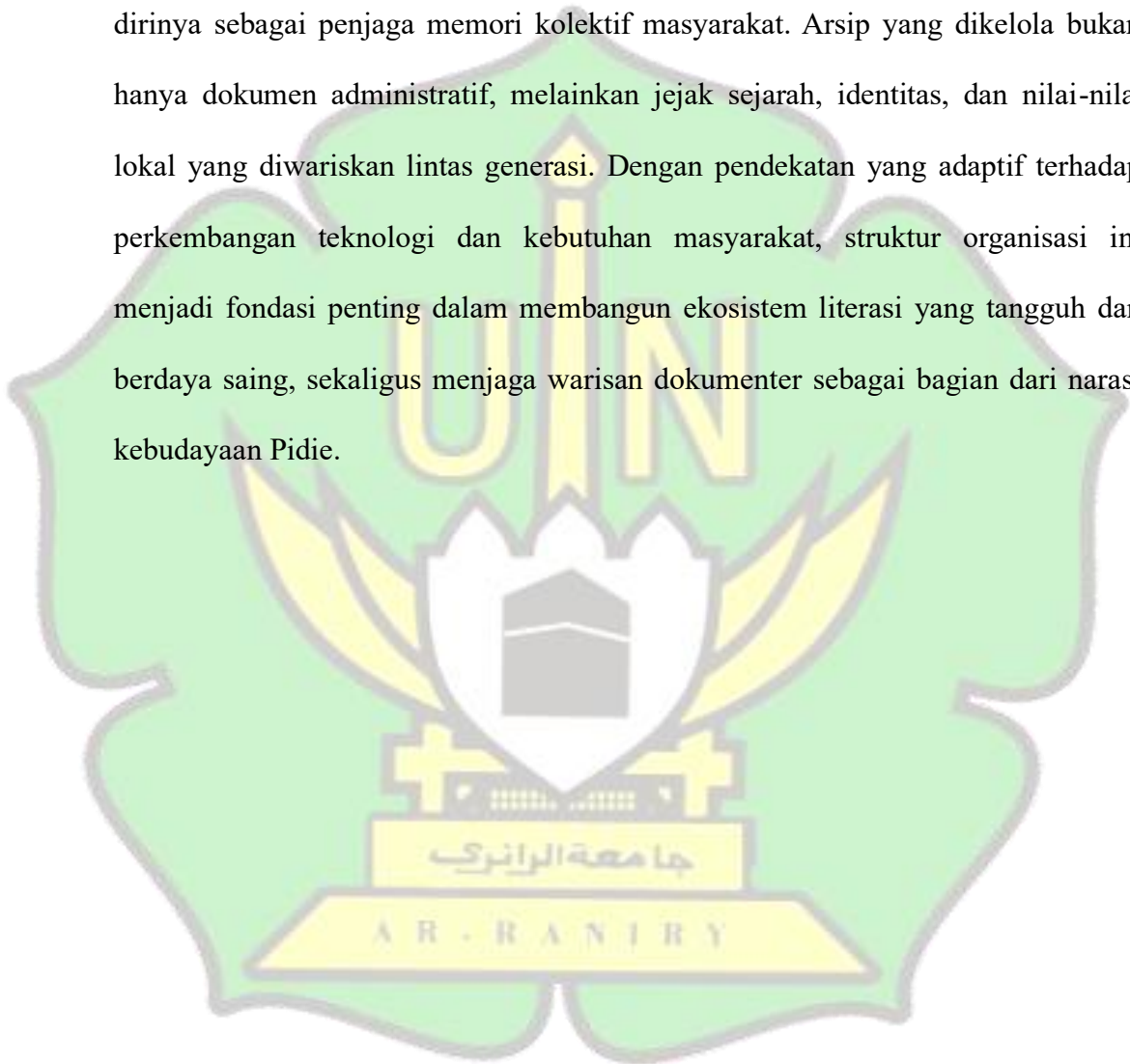
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie memiliki susunan organisas yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan

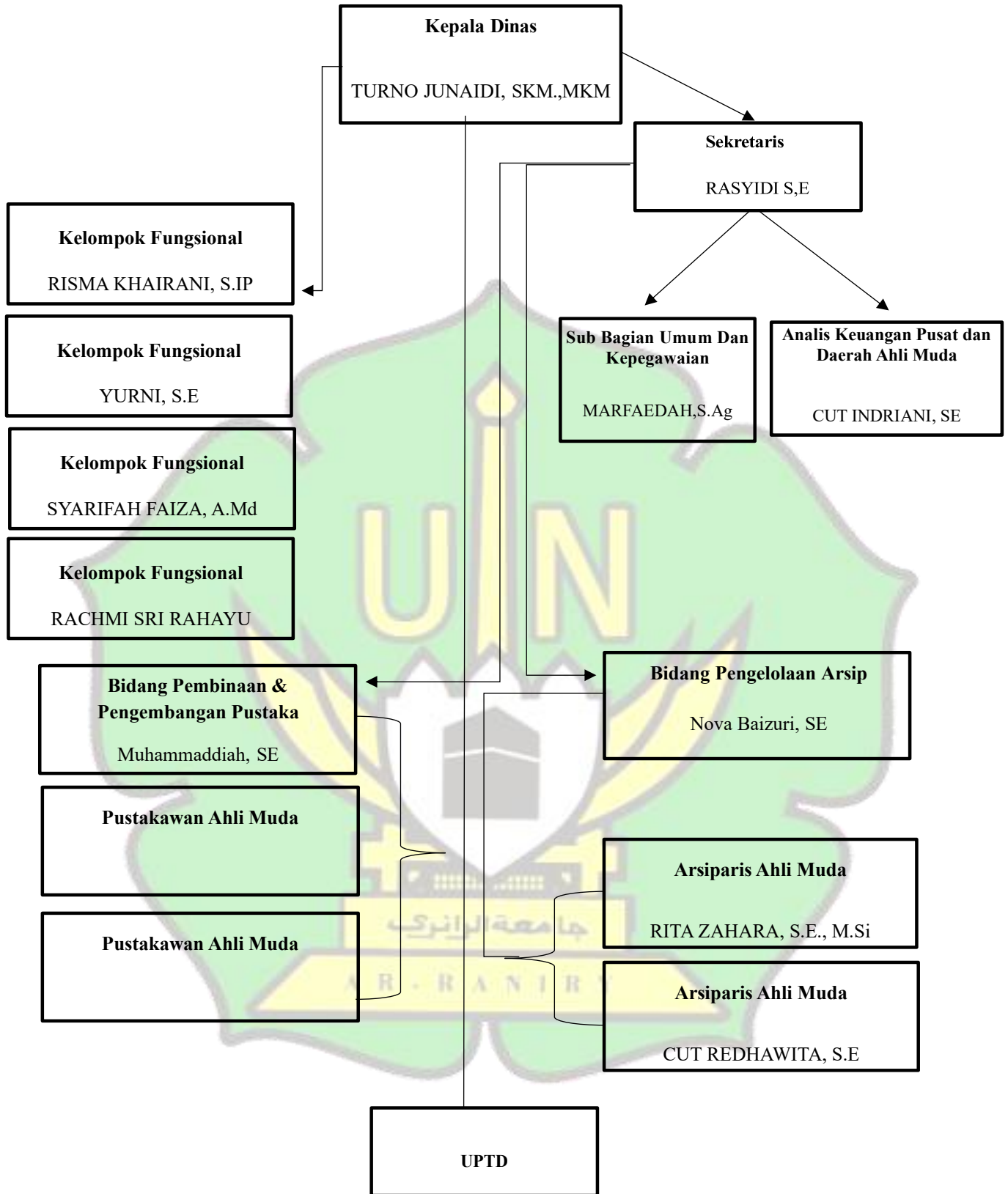
<sup>47</sup> Data Bagian Humas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie Tahun 2025

<sup>48</sup> Data Bagian Humas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie Tahun 2025

informasi dan pelestarian arsip secara optimal. Struktur ini mencerminkan komitmen institusi dalam menyediakan akses informasi yang berkualitas kepada masyarakat serta menjaga keberlanjutan dokumen dan arsip sebagai bagian dari memori kolektif daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie memposisikan dirinya sebagai penjaga memori kolektif masyarakat. Arsip yang dikelola bukan hanya dokumen administratif, melainkan jejak sejarah, identitas, dan nilai-nilai lokal yang diwariskan lintas generasi. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, struktur organisasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem literasi yang tangguh dan berdaya saing, sekaligus menjaga warisan dokumenter sebagai bagian dari narasi kebudayaan Pidie.





Gambar. 4.1 Sturktur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Pemahaman Kode Etik Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie

Kode Etik Pustakawan Indonesia merupakan seperangkat norma, nilai, dan pedoman moral yang disusun oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) untuk mengatur sikap dan perilaku pustakawan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>1</sup> Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai panduan etis agar pustakawan mampu bekerja secara adil, profesional, bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan informasi, dan mengedepankan integritas dalam pelayanan kepada pemustaka.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 4 orang pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie. Hasil wawancara menggambarkan adanya variasi dalam cara pustakawan memahami kode etik, mulai dari pemahaman yang bersifat normatif (sekadar aturan formal), pasrah pada keterbatasan (magis), hingga yang lebih kritis dan reflektif dalam menginternalisasi nilai-nilai kode etik. Variasi ini menunjukkan bahwa meskipun para pustakawan mengetahui keberadaan Kode Etik Pustakawan Indonesia, tingkat kedalaman pemahaman mereka tidaklah sama.

Seluruh informan menyatakan mengetahui adanya kode etik pustakawan yang berlaku di Indonesia. Namun, ketika diminta menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, sebagian besar belum mampu menyebutkan secara lengkap. Mereka hanya menyinggung kewajiban pustakawan dalam melayani pemustaka dengan baik, ramah, dan adil. Jawaban tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman mereka masih terbatas pada kewajiban pelayanan, belum mencakup prinsip-prinsip utama kode etik

sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi, seperti keadilan, tanggung jawab, profesionalisme, kerahasiaan informasi, dedikasi, dan kerja sama.

a. Pemahaman Kode Etik

Kondisi ini dapat dijelaskan lebih jauh dengan melihat latar belakang pendidikan para pustakawan yang beragam. Tidak semua informan berasal dari jurusan Ilmu Perpustakaan; ada yang berlatar belakang ilmu sosial maupun Sarjana Ekonomi. Hal ini berimplikasi pada kedalaman pemahaman mereka, sebab bagi yang bukan lulusan Ilmu Perpustakaan, pengetahuan tentang kode etik biasanya hanya diperoleh dari pengalaman kerja atau informasi umum, bukan dari pembelajaran akademis yang sistematis.

b. Sumber Pengetahuan tentang kode etik

Ketika ditanya mengenai sumber pengetahuan tentang kode etik pustakawan, para informan menjawab bahwa mereka memperolehnya terutama dari masa perkuliahan serta dari media elektronik seperti internet, artikel daring, maupun media sosial. Hanya satu orang informan yang menyatakan pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi resmi mengenai kode etik, sedangkan tiga lainnya belum pernah mendapatkan kes4an tersebut. Akibatnya, pemahaman yang mereka miliki cenderung parsial dan lebih teoritis, bukan hasil dari proses refleksi maupun pembinaan profesional yang berkesinambungan.

c. Tingkat Kesadaran

Apabila dianalisis secara individu, terlihat adanya perbedaan tingkat kesadaran sebagaimana dijelaskan Paulo Freire. Ibu Rachmi Sri Rahayu memandang kode etik terutama sebagai aturan yang wajib dipatuhi agar tidak

menyalahi ketentuan organisasi.<sup>49</sup> Pandangan ini mencerminkan kesadaran naif, yakni pemahaman yang hanya berhenti pada aturan formal tanpa refleksi kritis. Ibu Risma Khairany menekankan pentingnya kode etik, namun beranggapan keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam penerapannya.<sup>50</sup> Sikap pasrah terhadap keterbatasan ini sejalan dengan kesadaran magis, di mana individu menyadari nilai-nilai etis tetapi menyerahkan persoalan kepada keadaan eksternal. Berbeda dengan keduanya, Ibu Syarifah Faiza menunjukkan pemahaman yang lebih reflektif dengan menekankan bahwa kode etik adalah pedoman moral yang harus dijalankan secara konsisten, terutama terkait kerahasiaan informasi, keadilan layanan, dan dedikasi profesi.<sup>51</sup>

Hal ini menggambarkan kesadaran kritis, yakni pemahaman yang tidak hanya normatif, tetapi juga diinternalisasi dalam sikap profesional. Sementara itu, Ibu Yurni menilai kode etik penting untuk dijalankan, namun menambahkan bahwa sebagian pustakawan masih memandangnya sekadar formalitas.<sup>52</sup> Pandangan ini menunjukkan posisi di antara naif dan magis, karena sudah ada kesadaran, tetapi belum sepenuhnya mendalam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie terhadap kode etik berada pada level yang beragam dan belum merata. Mayoritas masih berada pada kesadaran naif dan magis, sedangkan hanya sebagian kecil yang sudah mencapai kesadaran kritis. Faktor yang memengaruhi

---

<sup>49</sup> Wawancara bersama Ibu Rachmi Sri Rahayu, S.Sos, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, 15 Agustus 2025 pukul 10.00

<sup>50</sup> Wawancara bersama Ibu Risma Khairany, S.IP, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, 15 Agustus 2025 pukul 10.30

<sup>51</sup> Wawancara bersama Ibu Syarifah Faiza, S.Sos, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, 15 Agustus 2025 pukul 11.00

<sup>52</sup> Wawancara bersama Ibu Yurni, S.E, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, 15 Agustus 2025 pukul 11.30

kondisi ini antara lain latar belakang pendidikan yang beragam, minimnya pelatihan dan sosialisasi kode etik, serta terbatasnya sumber pengetahuan yang hanya berasal dari kuliah dan media elektronik. Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas pustakawan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan rutin, serta forum diskusi profesional agar pemahaman mereka dapat berkembang dari sekadar mengetahui (naif) menuju pemahaman reflektif dan transformatif (kritis).

## 2. Penerapan Kode Etik Pustakawan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pidie.

Jika pemahaman kode etik bersifat konseptual, maka penerapan kode etik merupakan bentuk implementasi nyata dalam praktik sehari-hari pustakawan. Kode Etik Pustakawan Indonesia menuntut setiap pustakawan tidak hanya mengetahui prinsip-prinsip etis, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan nyata, seperti memberikan pelayanan yang adil, menjaga kerahasiaan informasi pemustaka, bekerja dengan profesional, serta menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab. Dengan demikian, penerapan kode etik dapat menjadi indikator sejauh mana pemahaman pustakawan benar-benar diinternalisasi ke dalam sikap dan perilaku kerja.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 4 orang pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie pada 15 Agustus 2025. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan kode etik sudah mulai dilakukan, meskipun masih terbatas pada aspek-aspek tertentu.

### a. Pelayanan kepada Pemustaka

Ibu Rachmi Sri Rahayu menyatakan bahwa penerapan kode etik dalam pekerjaannya terutama diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada pemustaka.

Menurutnya, pustakawan harus melayani dengan sopan, ramah, dan sesuai aturan yang berlaku agar masyarakat merasa nyaman menggunakan layanan perpustakaan.<sup>53</sup> Namun, ia juga mengakui bahwa aspek lain seperti menjaga kerahasiaan informasi pemustaka belum banyak diperhatikan karena keterbatasan sarana yang ada.

Ibu Risma Khairany menekankan bahwa penerapan kode etik memang penting, namun keterbatasan sumber daya manusia membuat beberapa prinsip tidak bisa dijalankan dengan optimal.<sup>54</sup> Ia mencontohkan bahwa idealnya pustakawan memberikan pelayanan yang cepat dan akurat, tetapi karena jumlah tenaga terbatas, layanan sering tertunda.

#### b. Menjaga Rahasia Setiap Pemustaka

Ibu Syarifah Faiza menunjukkan penerapan yang lebih reflektif. Ia menegaskan bahwa selain pelayanan ramah, pustakawan juga berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi pemustaka, tidak membeda-bedakan latar belakang pengguna, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap layanan.<sup>55</sup> Baginya, kode etik bukan sekadar aturan formal, tetapi pedoman moral yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

#### c. Pelayanan Langsung

Sementara itu, Ibu Yurni mengungkapkan bahwa dalam praktik sehari-hari, penerapan kode etik lebih sering diwujudkan dalam pelayanan langsung, seperti bersikap ramah, memberi bantuan kepada pemustaka, dan menjaga suasana

---

<sup>53</sup> Wawancara bersama Ibu Rachmi Sri Rahayu, S.Sos, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, 15 Agustus 2025 pukul 10.00

<sup>54</sup> Wawancara bersama Ibu Risma Khairany, S.IP, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, 15 Agustus 2025 pukul 10.30

<sup>55</sup> Wawancara bersama Ibu Syarifah Faiza, S.Sos, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, 15 Agustus 2025 pukul 11.00

perpustakaan tetap kondusif.<sup>56</sup> Namun, ia menilai bahwa sebagian pustakawan masih menganggap penerapan kode etik hanya sebatas formalitas pekerjaan.

Lebih jauh, ketika ditanya mengenai cara menjaga kerahasiaan informasi pemustaka, ke4 informan hanya menjawab bahwa kerahasiaan “harus dijaga”. Akan tetapi, tidak ada satu pun yang dapat menjelaskan langkah praktis, seperti penggunaan SOP atau pembatasan akses data. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan pada aspek teknis. Begitu pula saat ditanya mengenai pengalaman menangani kasus etis, semua informan tidak mampu menjelaskan karena belum pernah menghadapinya secara langsung. Fakta ini memperlihatkan bahwa penerapan kode etik di lapangan masih belum teruji dalam situasi nyata.

#### d. Revisi atau Pembaharuan Kode Etik

Ketika diberi pertanyaan mengenai kemungkinan revisi atau pembaruan kode etik, seluruh informan menjawab bahwa kode etik memang perlu diperbaharui agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, mereka tidak bisa menyebutkan secara rinci prinsip atau ketentuan mana yang harus ditambahkan atau direvisi. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun ada kesadaran akan kebutuhan pembaruan, pemahaman kritis pustakawan masih terbatas.

Jika dianalisis dengan teori Paulo Freire, maka penerapan kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie dapat dipetakan ke dalam tiga tingkatan kesadaran. Pertama, penerapan oleh Ibu Rachmi menunjukkan kesadaran naif, karena hanya terbatas pada perilaku pelayanan formal. Kedua, pandangan Ibu Risma menunjukkan kesadaran magis, yakni sudah berusaha menerapkan kode etik, tetapi cenderung pasrah pada keterbatasan SDM.

---

<sup>56</sup> Wawancara bersama Ibu Yurni, S.E Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, 15 Agustus 2025 pukul 11.30

Ketiga, pandangan Ibu Syarifah memperlihatkan kesadaran kritis, karena ia berusaha men4kan kode etik sebagai pedoman moral yang konsisten. Adapun pandangan Ibu Yurni berada di antara naif dan magis, karena penerapan kode etik diakuinya penting, namun sebagian pustakawan masih memandangnya sebatas rutinitas kerja.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie masih cenderung parsial. Penerapan lebih menekankan pada aspek pelayanan ramah dan adil, sementara aspek lain seperti kerahasiaan informasi, profesionalisme, dan penyelesaian kasus etis masih lemah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman kritis agar

### 3. Kendala/Tantangan Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie

Selain pemahaman dan penerapan, penelitian ini juga menyoroti kendala dan tantangan yang dihadapi pustakawan dalam melaksanakan Kode Etik Pustakawan Indonesia. Kendala ini penting dikaji karena dapat menjelaskan mengapa kode etik yang sudah dipahami belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 orang pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie pada 15 Agustus 2025, ditemukan beberapa kendala yang bersifat mendasar.

#### a. Perbedaan Pemahaman

Ibu Rachmi Sri Rahayu mengungkapkan bahwa hambatan yang kerap muncul adalah perbedaan pemahaman antar pemustaka.<sup>57</sup> Menurutnya, sering kali

---

<sup>57</sup> Wawancara bersama Ibu Rachmi Sri Rahayu, S.Sos, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, 15 Agustus 2025 pukul 10.00

pengguna layanan perpustakaan memiliki harapan dan persepsi yang berbeda-beda mengenai pelayanan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik. Namun, ia tidak menjelaskan secara konkret faktor internal maupun eksternal lain yang menjadi hambatan pustakawan dalam menerapkan kode etik.

b. Kendala Teknis

Ibu Risma Khairany menyatakan bahwa secara umum tidak ada prinsip kode etik yang sulit diterapkan di lapangan.<sup>58</sup> Ia beranggapan bahwa semua aturan dapat dijalankan, meskipun terkadang terdapat kendala teknis dalam pelayanan akibat keterbatasan jumlah tenaga. Jawaban ini menunjukkan bahwa hambatan yang dirasakan lebih bersifat teknis, bukan pada prinsip kode etik secara mendalam.

Ibu Syarifah Faiza juga menuturkan hal yang sama, yakni tidak ada prinsip dalam kode etik yang sulit diterapkan.<sup>59</sup> Baginya, selama pustakawan berpegang pada aturan, semua dapat dijalankan dengan baik. Namun, jawaban ini terkesan normatif karena tidak disertai penjelasan konkret mengenai kendala nyata yang dihadapi dalam praktik kerja.

Sementara itu, Ibu Yurni menyebutkan bahwa kendala yang ada lebih disebabkan oleh perbedaan persepsi antar pemustaka terhadap pelayanan.<sup>60</sup> Selibhnya, ia menyatakan tidak menemukan hambatan berarti dalam penerapan kode etik. Sama seperti informan lainnya, jawabannya masih bersifat dasar dan belum menyentuh aspek struktural maupun profesional yang lebih mendalam.

---

<sup>58</sup> Wawancara bersama Ibu Risma Khairany, S.IP, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, 15 Agustus 2025 pukul 10.30

<sup>59</sup> Wawancara Bersama Ibu Syarifah Faiza, S.Sos, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, 15 Agustus 2025 pukul 11.00

<sup>60</sup> Wawancara bersama Ibu Yurni, S.E Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, 15 Agustus 2025 pukul 11.30

Jika dilihat dari keseluruhan jawaban, mayoritas informan menilai bahwa hambatan penerapan kode etik tidak signifikan, kecuali pada aspek perbedaan pemahaman antar pemustaka. Hal ini memperlihatkan bahwa tingkat refleksi kritis mereka masih terbatas. Menurut teori Paulo Freire, kondisi ini menggambarkan kecenderungan kesadaran naif, karena pustakawan cenderung menganggap tidak ada masalah berarti padahal dalam kenyataannya terdapat keterbatasan SDM, kurangnya SOP, serta minimnya pelatihan yang sudah mereka akui di bagian sebelumnya. Dengan demikian, jawaban mereka cenderung formal dan belum kritis dalam mengidentifikasi hambatan nyata, baik internal (kompetensi, SDM, fasilitas) maupun eksternal (dukungan struktural, pemahaman masyarakat).

Kendala penerapan kode etik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie masih dipandang ringan oleh pustakawan, bahkan sebagian menyatakan tidak ada hambatan berarti. Namun, bila dikaji lebih dalam, hambatan nyata sebenarnya meliputi:

- a. Perbedaan pemahaman antar pemustaka.
- b. Keterbatasan jumlah pustakawan dengan latar belakang pendidikan berbeda.
- c. Minimnya pelatihan dan sosialisasi khusus mengenai kode etik.
- d. Ketiadaan SOP teknis untuk menjaga kerahasiaan dan menyelesaikan kasus etis.

Dengan demikian, kendala sesungguhnya tidak hanya berasal dari pengguna, tetapi juga dari keterbatasan internal institusi dan belum terbangunnya kesadaran kritis pustakawan terhadap kompleksitas penerapan kode etik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman Pengelolaan perpustakaan terhadap Kode Etik Pustakawan masih belum optimal dan cenderung beragam. Sebagian besar pustakawan menunjukkan pemahaman yang berada pada tingkat kesadaran naif, sebagaimana dikategorikan oleh Paulo Freire, yang berarti mereka menjalankan tugas berdasarkan kebiasaan dan instruksi tanpa refleksi kritis terhadap nilai-nilai etika profesi. Hanya sebagian kecil yang telah mencapai kesadaran kritis, yaitu mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika secara sadar dan bertanggung jawab. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya pemahaman ini antara lain latar belakang pendidikan yang tidak sepenuhnya berasal dari bidang Ilmu Perpustakaan, minimnya pelatihan dan sosialisasi kode etik secara formal, serta belum tersedianya SOP teknis yang mengatur penerapan etika secara sistematis.

Dalam praktik pelayanan, pustakawan cenderung menekankan aspek keramahan dan keadilan, namun belum sepenuhnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip penting lainnya seperti kerahasiaan informasi, penyelesaian konflik etis, dan refleksi profesional. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan persepsi antar pemustaka, dan belum adanya pembinaan berkelanjutan yang mendukung penguatan pemahaman etis secara menyeluruh.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pustakawan untuk meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme dalam melayani pemustaka:

### 1. Meningkatkan Kesadaran Etis dalam Pelayanan.

Pustakawan disarankan selalu menerapkan kode etik profesi dalam setiap interaksi dengan pemustaka. Hal ini mencakup sikap sopan, ramah, dan menghormati hak-hak pemustaka sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan profesional.

### 2. Menghargai Privasi dan Mematuhi Prosedur Layanan

Pustakawan perlu memastikan bahwa kebijakan privasi, prosedur peminjaman, pengembalian, dan batasan layanan dijalankan secara konsisten. Kepatuhan terhadap prosedur ini akan meningkatkan kepercayaan pemustaka dan meminimalkan konflik atau kesalahpahaman.

### 3. Aktif dalam Evaluasi dan Peningkatan Layanan

Pustakawan dianjurkan untuk secara rutin mengevaluasi kualitas layanan melalui masukan pemustaka, observasi, atau pelatihan internal. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan layanan, inovasi program, dan peningkatan kompetensi profesional.

### 4. Membangun Relasi yang Konstruktif dengan Pemustaka

Pustakawan sebaiknya membangun komunikasi terbuka dan kooperatif dengan pemustaka. Partisipasi aktif dalam kegiatan literasi, edukasi, atau program perpustakaan lainnya akan memperkuat hubungan positif antara pustakawan dan pemustaka.

#### 5. Meningkatkan Kompetensi Profesional Secara Berkelanjutan

Pustakawan dianjurkan mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop terkait Pengelolaan informasi, literasi digital, dan layanan perpustakaan modern. Peningkatan kompetensi ini akan memperkuat kualitas pelayanan dan relevansi pustakawan dalam era informasi saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andena, Yosefa, Albertus Pramoekti Narendra, dan Anton Hermawan. “Etika Pustakawan dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Tunas Muda SMP Stella Matutina Salatiga.” *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 2023.
- Anshari, Muhammad, dan Laila Silviana. “Pengelolaan Layanan Sirkulasi dalam Meningkatkan Minat Kunjung Peserta Didik di Perpustakaan Sekolah.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, 6(1), 2021.
- Bappeda Kabupaten Pidie. *Rencana Strategis Pengembangan Perpustakaan Daerah 2020–2025*. Sigli: Bappeda, 2020.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie. *Profil Lembaga Tahun 2025*. Sigli: DPK Pidie, 2025.
- Ginting, Rafika Zahara, Khoirul Jamil, dan Yusniah Yusniah. “Penerapan Etika Pustakawan Dalam Pembentukan Karakter Budaya Kerja Pustakawan.” *JISPENDORA: Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora*, 3(1), 2025.
- Hasan, M. I. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nasution, Laila Hadri. “Etika Profesi Pustakawan dalam Perspektif Kelembagaan.” *Jurnal Kepustakawanan dan Informasi*, 5(1), 2022.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nur’aini & Laila Hadri Nasution. “Kode Etik Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan.” *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 9(2), 2021.
- Peraturan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie No. 02 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pustakawan.
- Pranata, Aldi & Ika Krismayani. “Penerapan Kode Etik Pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas Diponegoro.” *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(2), 2020.

- Purwanti, D. "Persepsi Pustakawan terhadap Kode Etik Profesi Pustakawan Indonesia." *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 8(2), 2019. <https://doi.org/10.22146/jipi.45502>.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Siregar, D., dan N. Maulina. "Implementasi Kode Etik Pustakawan dalam Pelayanan di Perpustakaan Umum." *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 10(1), 2020.
- Sopian, Imam, Abubakar Umar, dan Yadi Fahmi Arifudin. "Pengembangan Kode Etik Pustakawan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pemustaka." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(8), 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Wawancara dengan Ibu Rachmi Sri Rahayu, S.Sos, 15 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Ibu Risma Khairany, S.IP, 15 Agustus 2025.
- Wawancara dengan Ibu Syarifah Faiza, S.Sos, 15 Agustus 2025.
- Wawancara dengan pustakawan Ibu Yurni, 28 Mei 2025.
- Wawancara dengan Ibu Yurni, S.E, 15 Agustus 2025.
- Yuni Sara. "Penerapan Kode Etik Pustakawan dalam Meningkatkan Integritas Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong." Skripsi, IAIN Curup, 2025.
- Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zulfikar, M. "Konteks Sosial Budaya dalam Pengelolaan Perpustakaan Daerah di Aceh." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 2023.

Lampiran 1

Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR: 886/Un.08/FAH/KP.004/04/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi/karya ilmiah/tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2023 tentang Panduan Akademik bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 200 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH.

Kesatu : Menunjuk saudara :  
Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S., Ph.D ( Pembimbing tunggal )

Untuk membimbing Skripsi mahasiswa

Nama : Muhammad Rozie

NIM : 190503089

Prodi : Ilmu Perpustakaan (IP)

Judul : Tingkat Pemahaman Pengelola Perpustakaan terhadap Kode Etik Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pidie

Masa Bimbingan : Enam Bulan TMT (14 April 2025 s/d 14 Oktober 2025)

Kedua : Kepada pembimbing tunggal tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut dengan sepengetahuan fakultas.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 14 April 2025  
Dekan,

  
Syarifuddin

Tembusan :

1. Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
2. Pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir
3. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1695/Un.08/FAH.I/PP.00.9/07/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Dinas perpustakaan dan kearsipan Pidie

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 190503089

Nama : MUHAMMAD ROZIE

Program Studi/Jurusan : Ilmu Perpustakaan

Alamat : Jalan Jabal Ghafur Desa Pasar Kota Bakti Kec. Sakti Kab. Pidie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINGKAT PEMAHAMAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN TERHADAP KODE ETIK PUSTAKAWAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PIDIE**

Banda Aceh, 22 Juli 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S., Ph.D.

NIP. 197101101999031002

Berlaku sampai : 31 Agustus 2025





**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. Banda Aceh-Medan Km.115 Tjue Sigli Kode Pos 24151

Website : [dispersip.pidiekab.go.id](http://dispersip.pidiekab.go.id)

Sigli, 31 Juli 2025 M  
06 Shafar 1447 H

Nomor : 400.14.5.4 / 451 / 2025  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Ar- Raniry  
di -

Banda Aceh.

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar- Raniry Banda Aceh Nomor 1695/Un.08/FAH.I/PP.00.9//07/2025, tanggal 22 Juli 2025 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami menerangkan bahwa :  
Nama : **MUHAMMAD ROZIE**  
NIM : **190503089**  
Program Study/Jurusan : Ilmu Perpustakaan  
Alamat : Jln. Jabal Ghafur Desa Pasar Kota Bakti Kec. Sakti Kabupaten Pidie.
3. Kami tidak berkeberatan dan dapat memberi izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian Ilmiah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul: **"TINGKAT PEMAHAMAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN TERHADAP KODE ETIK PUSTAKAWAN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PIDIE"**.
4. Demikian kami sampaikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya,atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN PIDIE**



**TURMO JUNAIDI, SKM, MKM**  
Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 197102011994031007

## LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

### A. Pemahaman Kode Etik Pustakawan

- 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada Kode Etik Pustakawan yang berlaku di Indonesia?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan pokok dari diberlakukannya Kode Etik Pustakawan?
- 3) Melalui media atau kegiatan apa Bapak/Ibu memperoleh pengetahuan mengenai Kode Etik Pustakawan?
- 4) Prinsip-prinsip apa saja yang terkandung dalam Kode Etik Pustakawan yang dapat Bapak/Ibu jelaskan?
- 5) Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi khusus mengenai Kode Etik Pustakawan? Bagaimana manfaatnya terhadap peningkatan pemahaman Bapak/Ibu?

### B. Penerapan Kode Etik Pustakawan

- 1) Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan prinsip keadilan dalam memberikan layanan kepada pemustaka?
- 2) Apa bentuk tanggung jawab profesional yang Bapak/Ibu jalankan dalam pelaksanaan tugas kepastakawanan sehari-hari?
- 3) Bagaimana cara Bapak/Ibu menjaga kerahasiaan informasi pemustaka sesuai ketentuan kode etik?
- 4) Pernahkah Bapak/Ibu menghadapi situasi yang menuntut pengambilan keputusan etis? Bagaimana Bapak/Ibu menyelesaikannya?
- 5) Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana penerapan kode etik mempengaruhi hubungan kerja sama dan koordinasi di antara pustakawan?
- 6) Menurut Bapak/Ibu, langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik di lingkungan perpustakaan ini?
- 7) Jika Bapak/Ibu diberikan kesempatan untuk merevisi Kode Etik Pustakawan, prinsip atau ketentuan apa yang akan Bapak/Ibu tambahkan atau perbarui? Jelaskan alasannya.
- 8) Jika Bapak/Ibu mengetahui adanya pelanggaran kode etik oleh rekan kerja, langkah apa yang akan Bapak/Ibu ambil untuk menanganinya?
- 9) Faktor-faktor apa yang menurut Bapak/Ibu paling berpengaruh dalam membantu memahami dan menerapkan kode etik dengan baik?

### C. Kendala / Tantangan Kode Etik Pustakawan

- 1) Hambatan apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam penerapan kode etik di lingkungan kerja?
- 2) Apakah terdapat prinsip-prinsip dalam kode etik yang sulit diterapkan di lapangan? Apa faktor penyebabnya?



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Bersama Ibu Yurni



Wawancara Bersama Ibu Risma



Wawancara Bersama Ibu Syarifah



Wawancara Bersama Ibu Rachmi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Rozie  
Tempat, Tanggal Lahir : Gp Lada, 25 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Status perkawinan : Belum Kawin  
Perkerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Pasar Kota Bakti  
Telp/Hp : 0823-2464-4757  
Email : 190503089@student.ar-raniry.ac.id

### Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 4 Kota Bakti  
SMP/Mts : SMPN 1 Sakti  
SMA/MA : SMAN 1 Sakti  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Ibrahim Yusuf  
Nama Ibu : Naimah  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan. PNS  
Pekerjaan Ibu : IRT  
Alamat Orang Tua : Pasar Kota Bakti, Sakti, Pidie